

# BAB I

## PENDAHULUAN

Perkembangan isu dalam Ilmu Hubungan Internasional semakin hari semakin bergerak dinamis, meninggalkan segalanya yang sudah terlewatkan dan menjadi permasalahan kompleks yang terjadi pada saat sekarang ini termasuk kedepannya. Hubungan Internasional dituntut untuk mengikuti perkembangan tersebut demi memperoleh kemajuan dan kemanfaatan bagi ilmu ini. Kedinamisan ilmu inipun salah satunya terlihat dari dinamika isu-isu dan fenomena yang terjadi di dunia internasional yang tidak habis-habisnya untuk selalu kita kaji dan analisa secara mendalam sehingga terurai dari benang kusut keilmuan yang ada, sehingga mampu menjelaskan fenomena yang sedang terjadi.

Pembangunan ekonomi merupakan isu yang sangat populer dibicarakan pada saat sekarang ini baik oleh akademisi-akademisi Hubungan Internasional dan masyarakat dunia. Salah satu isu yang juga terjadi di kawasan Asia Timur, khususnya yang terjadi di negara Tiongkok dan Hong Kong, dimana Hong Kong yang merupakan salah satu bagian dari negara Tiongkok memiliki sistem perekonomian yang sangat bagus dan maju, dengan demikian Tiongkok menjadikan Hong Kong sebagai salah satu *Special Region Administrative* atau daerah khusus yang memiliki beberapa keistimewaan dibandingkan daerah lainnya.

### A. Latar Belakang

Hong Kong merupakan suatu daerah yang terletak dikawasan ujung tenggara daratan negara Tiongkok, yang memiliki luas wilayah 1.104 kilometer persegi meliputi Pulau Hongkong, Kowloon dan *New Territories* dan kepulauan. Wilayah Hong Kong terbagi menjadi dua sisi yang mana salah satu bagiannya tergabung dengan daratan Tiongkok secara geografis dan wilayah lainnya yang berbentuk kepulauan (Mathews , Ma, & Lui, 2008)

Populasi Hong Kong yang tercatat pada Juli 2017 adalah sejumlah 7.191503 penduduk (Central Intelligence Agency). Penduduk asli Hong Kong pada awalnya adalah sebuah kelompok etnis yang terbentuk oleh orang-orang yang berasal dari etnis China yang jumlahnya mencapai kurang lebih 93,7 % dari banyaknya populasi. Tetapi setelah akhir Perang Dunia II hingga saat ini penduduk Hongkong kebanyakan merupakan keturunan imigran dari daratan China dan imigran dari seluruh dunia. Awal mula kedatangan

imigran ke Hong Kong dimulai Sejak perang saudara dan kebangkitan Partai Komunis pada 1949, kebanyakan dari imigran berasal dari Shanghai (CNN Indonesia, 2014).

Sejarah Hong Kong modern dimulai di abad 19. Pada masa pemerintahan Dinasti Qing, Tiongkok kalah dalam Perang Opium tahun 1842, dan tidak dapat mempertahankan Hong Kong sehingga menjadi daerah kolonial jajahan Inggris. Hong Kong menjadi koloni Inggris dengan diserahkan Pulau Hong Kong, kemudian diikuti Semenanjung Kowloon tahun 1860 dan penyewaan 99 tahun wilayah New Territories di tahun 1898. Setelah berada dibawah kekuasaan Jepang selama Perang Dunia II (1941–1945), Inggris kembali mengontrol Hong Kong hingga 30 Juni 1997.

Hong Kong berkembang dengan sangat cepat di bawah kekuasaan Inggris sehingga menjadi salah satu pusat kegiatan ekonomi dan keuangan dunia. Kemudian pada 1982, London dan Beijing memulai perundingan yang sulit mengenai prosedur dan syarat-syarat pengembalian Hong Kong ke Tiongkok. Hong Kong menerapkan sistem ekonomi dan politik yang sangat berbeda dengan Tiongkok daratan, yang sejak 1949 berada di bawah kekuasaan Partai Komunis, satu-satunya partai yang dibolehkan berdiri di negara tersebut (BBC Indonesia, 2017).

Pada tanggal 1 Juli 1997, daerah Hongkong secara resmi dikembalikan oleh pemerintah Britania Raya (Inggris) kepada Republik Rakyat Tiongkok, setelah sebelumnya telah menjadi daerah kolonial Inggris selama kurang lebih 150 tahun. Hong Kong merupakan daerah yang memiliki status otonomi yang tinggi dikarenakan adanya perjanjian dan persetujuan sebelum dikembalikan kepada Tiongkok. Otonomi ini berlaku di Hongkong minimal untuk 50 tahun dihitung dari tahun 1997 (Overholt).

Setelah lepas dari Inggris, Hong Kong menjadi salah satu daerah yang dianggap akan menjadi pusat perekonomian Asia. Hong Kong memiliki perkembangan yang lebih tinggi dari wilayah Tiongkok yang lain dalam berbagai sektor mampu menjadi jembatan penghubung dengan wilayah Tiongkok yang lain karena perekonomiannya yang berkembang sangat maju. Hong Kong juga dikatakan sebagai salah satu bagian dari negara Tiongkok yang memiliki keunikan tersendiri (Michael J. Enright, 1997).

Hong Kong merupakan salah satu daerah yang muncul sebagai kekuatan ekonomi di Tiongkok, dimana dengan adanya efisiensi regulasi berupa kebebasan bisnis yang terlindungi dengan baik dalam kerangka peraturan yang efisien. Transparansi mendorong

kewiraswastaan, dan lingkungan yang kondusif untuk pembentukan dan operasi bisnis pemula. Kode ketenagakerjaan benar-benar ditegakkan untuk mendorong produktivitas. Hong Kong memiliki kontrol harga yang sangat rendah, akan tetapi terdapat beberapa dana subsidi, harga sewa dan harga perumahan sebagai penunjang untuk telekomunikasi, transportasi umum, dan listrik (Heritage Foundation, 2017).

Wilayah Administratif Khusus Hong Kong adalah pusat bisnis, perdagangan dan keuangan internasional. Dengan membangun kebijakan ekonomi pasar bebas tradisionalnya, Hong Kong telah berkembang menjadi pusat ekonomi jasa modern yang dinamis dan kosmopolitan, yang mendukung peran kota sebagai platform bisnis global (Chan, 2017).

Hong Kong pada hakikatnya merupakan wilayah administrasi khusus dimana sebuah status administrasi ini muncul sebagai konsekuensi kebijakan dari Beijing (Satu Negara Dua Sistem) yang merupakan kebijakan politik khusus yang digagas oleh Deng Xiaoping untuk penyelesaian masalah status Hong Kong yang pada saat itu sedang dalam proses pengembalian kedaulatan dari Inggris kepada Republik Rakyat Tiongkok, yang pada intinya menekankan bahwa dalam naungan satu negara, Hongkong berhak menikmati sistem pemerintahan yang berbeda dan otonomi yang luas dari pemerintah Tiongkok, terkecuali di bidang pertahanan dan luar negeri, sedangkan bidang-bidang lain seperti yang sudah dijelaskan diatas seperti diantaranya mengenai perdagangan, mata uang, dan imigrasi seharusnya menjadi wewenang bagi wilayah penerima administrasi yang khusus, yaitu Hong Kong dan Macao (Guang, 2012).

Jika dibandingkan dengan wilayah lain di negara Tiongkok, terdapat keistimewaan Hong Kong yang tidak didapatkan oleh wilayah lain di Tiongkok. Namun disamping itu terdapat fakta-fakta berupa kemajuan yang sangat pesat pada wilayah lain di negara Tiongkok, contohnya seperti provinsi yang secara geografis berada dekat dengan Hong Kong yaitu Shanghai, Guangzhou dan provinsi lainnya. Kemajuan ekonomi dari beberapa wilayah ini juga berdampak pada pembangunan ekonomi Tiongkok secara keseluruhan. Dilihat dari era dimana Hong Kong mengalami kemajuan yang sangat pesat, sebenarnya beberapa wilayah di Tiongkok juga mengalami kemajuan pesat dalam berbagai sektor yang memberikan dampak berupa peningkatan ekonomi Tiongkok.

Shanghai merupakan salah satu wilayah yang mengalami kemajuan ekonomi di Tiongkok, dapat dilihat dari pertumbuhan

ekonomi di masyarakat dan kemajuan sektor-sektor yang ada di wilayah tersebut. Shanghai mampu menggunakan potensi yang dimiliki sebaik mungkin, salah satunya yaitu Shanghai menjadi kota pelabuhan tersibuk di dunia dalam hal penanganan kargo. Di sisi lain sektor industrinya makin berkembang sehingga mampu mengundang banyak investor asing untuk menanamkan investasinya (John L. Graham, 2007).

Guangzhou merupakan wilayah yang secara geografis berada sangat dekat dengan Hong Kong, Guangzhou merupakan salah satu wilayah yang terhitung maju di negara Tiongkok, melihat dari PDB Guangzhou yang semakin meningkat setiap tahunnya, dan kemajuan dari berbagai sektor yang mendorong peningkatan pendapatan daerah (The People`s Government of Guangzhou Municipality, 2010). Dalam beberapa tahun terakhir Guangzhou juga mengalami pertumbuhan PDB tertinggi dibandingkan dengan provinsi lain di Tiongkok secara keseluruhan. Ekspansi yang cepat dari perspektif konsumen terhadap perubahan pusat kota dan Guangzhou keseluruhan mengalami tiga transformasi dalam jangka waktu lama, hal ini menyebabkan pasokan akan barang-barang hasil industri meningkat (Guangzhou Daily Luo Hua Lin , 2017).

Pada tahun 1982 Perdana Menteri Inggris Margareth Teacher mengunjungi Tiongkok untuk melakukan perundingan mengenai status Hong Kong dengan pemerintah Tiongkok. Pemerintah Tiongkok selanjutnya membuat sebuah kebijakan yang tertuang dalam pasal 31 yang mengizinkan Hong Kong untuk menjad SAR (*Special Administrative Regions*) atau Wilayah Administrasi Khusus.

Kemudian, terbentuklah deklarasi bersama antara Tiongkok dengan Inggris pada tahun 1984 yang ditandatangani oleh PM Margareth Teacher selaku perwakilan dari Inggris dan PM Zhao Ziyang selaku perwakilan dari Tiongkok. Deklarasi ini berisi beberapa poin penting diantaranya yaitu, Tiongkok akan mengakui kedaulatan khusus atas Hong Kong dihitung efektif sejak 1 Juli 1997, Hongkong akan menjadi SAR dan dapat memiliki otonomi yang lebih tinggi dari wilayah Tiongkok yang lain, kecuali dalam bidang hubungan luar negeri, dan pertahanan militer. Ranah-ranah yang menjadi kewenangan daerah administratif khusus Hong Kong adalah seputar pada bidang ekonomi dan hubungan budaya.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah diatas dapat ditarik sebuah rumusan masalah yaitu “Mengapa Tiongkok memberikan status *Special Administrative Region* (SAR) kepada Hong Kong?”

## **C. Kerangka Pemikiran**

Untuk membahas pokok permasalahan diatas, penulis menggunakan pendekatan teori dan konsep sebagai berikut :

### **1. Teori Rasional Integrasi**

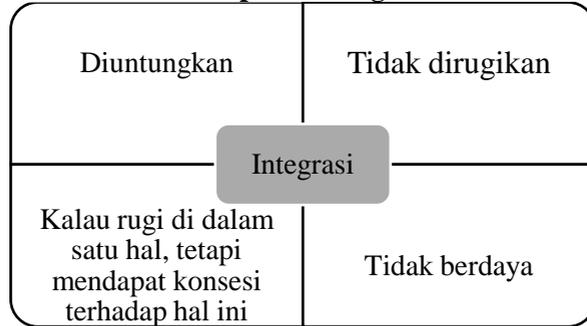
Dalam perkembangannya, sebuah negara tidak terlepas dari kejadian sejarah dari setiap daerah bagian didalamnya. Setiap sejarah menjadi suatu bukti adanya proses yang dilalui oleh suatu daerah agar mendapatkan pengakuan. Hong Kong merupakan salah satu wilayah kolonial Inggris yang kemudian tergabung ke dalam negara Tiongkok, hal tersebut tidak terlepas dari sejarah negara Tiongkok. Proses integrasi yang dibentuk oleh pemerintah Tiongkok adalah suatu upaya dalam mempertahankan Hong Kong agar tetap menjadi bagian dari wilayahnya.

Integrasi secara umum adalah pembauran dari unit-unit berbeda dan terpisah hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Rasional itu sendiri adalah menurut pikiran dan pertimbangan yang logis; menurut pikiran yang sehat; cocok dengan akal (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud, 2017). Oleh karenanya, rasional integrasi diartikan sebagai pembauran dari unit-unit yang berbeda menjadi satu kesatuan yang didasarkan pada pikiran dan pertimbangan yang logis.

Menurut salah satu Profesor di jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Prof. Tulus Warsito.M.Si. sebagai dosen pembimbing skripsi saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini, mengemukakan Teori Rasional Integrasi, dimana beliau menyatakan bahwa,

“Satu Komponen yang bersedia bergabung (berintegrasi) dengan komponen yang lain dalam entitas yang baru jika merasa: (1) diuntungkan; (2) tidak dirugikan; (3) kalau rugi di dalam satu hal, tetapi mendapat konsesi terhadap hal ini; (4) dan tidak berdaya.” (Warsito, Teori Rasional Integrasi, 2018) (Warsito, Rasionalitas Politik, 2017)

**Tabel 1.1**  
**Komponen integrasi**



Rasional Integrasi yang dimaksud oleh Profesor Tulus Warsito adalah satu komponen yang bersedia bergabung dengan komponen yang lain untuk membentuk entitas baru berdasarkan empat hal yang menjadi pertimbangan komponen tersebut. Selain itu rasional integrasi adalah bagaimana suatu entitas politik melakukan hubungan dengan entitas politik lainnya berdasarkan apa yang hendak dituju berdasarkan kepentingan diantara kedua entitas politik tersebut. Adanya komponen-komponen dalam integrasi menyatakan bahwa hubungan antara dua entitas politik memiliki kecenderungan untuk mendapatkan keuntungan yang sama dan tidak rugi.

Aplikasi dari teori ini dalam kasus yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah, bahwa Hong Kong merupakan wilayah bagian dari negara Tiongkok yang telah dikembalikan oleh Inggris di tahun 1997 setelah kurang lebih 150 tahun menjadi wilayah kolonialnya. Adanya pemindahtanganan kedaulatan dari Inggris ke Tiongkok menciptakan suatu gejolak baru dimana rakyat Hong Kong ingin berdiri sendiri dan menjadi negara berdaulat seutuhnya. Hal ini dapat dilihat dari adanya opini-opini dari beberapa elemen masyarakat Hong Kong sebelum Hong Kong diserahkan ke Tiongkok. Namun Pemerintah Tiongkok memilih untuk melakukan proses integrasi dengan Hong Kong dengan menjadikannya sebagai daerah SAR atau wilayah administrasi khusus.

Pada awalnya Tiongkok menganut kebijakan administrasi *One China Policy* dimana Tiongkok yang berstatus sebagai negara kesatuan mengharuskan setiap wilayah didalamnya mengikuti aturan yang telah disepakati oleh pemerintah pusat dan tidak ada perbedaan antar wilayah. Namun dikarenakan adanya desakan oleh rakyat Hong Kong yang menyatakan bahwa wilayah ini tidak mau kembali menjadi

bagian Tiongkok dikarenakan tidak adanya perubahan kebijakan administrasi *One China Policy* oleh pemerintah Tiongkok. Berdasarkan tujuan awal Tiongkok untuk mempertahankan Hong Kong sebagai salah satu wilayah bagiannya, pemerintah Tiongkok mulai menganut kebijakan administrasi baru yaitu *One Country Two System*, atau kebijakan administrasi dimana beberapa wilayah tertentu di Tiongkok memiliki perbedaan aturan dalam politik dan ekonomi dibandingkan wilayah lainnya. Kebijakan ini mulai dianut oleh pemerintah Tiongkok pada tahun 1982 untuk mengakurkan paham sosialis yang anut oleh Tiongkok dengan wilayah-wilayah seperti Hong Kong dan Taiwan yang menganut paham kapitalis. (Ministry of Foreign Affairs, 2017) Dengan dianutnya kebijakan ini, Tiongkok dapat menjadikan Hong Kong sebagai wilayah khusus yang masih bisa menikmati ideologi dan kebebasan yang dimiliki di masa kolonial Inggris, dan pengadaan otonomi khusus dalam perekonomian.

Dengan dijadikannya Hong Kong sebagai salah satu wilayah SAR di negara Tiongkok, Hong Kong memiliki beberapa kebebasan yang tidak dimiliki oleh wilayah Tiongkok lainnya seperti dolar Hong Kong yang tetap dapat dipertukarkan secara bebas, selain itu perdagangan devisa, emas dan pasar saham masih beroperasi seperti sebelumnya. Masyarakat Hong Kong adalah masyarakat bebas dengan hak-hak yang dilindungi secara hukum. Pemerintah Hong Kong SAR mengikuti pendekatan tanpa campur tangan secara umum terhadap kebijakan ekonomi yang menekankan peran utama sektor swasta. Disisi lain Hong Kong juga memiliki kebebasan dalam memajukan sektor industri, sumber daya dan terhadap pergerakan modalnya (Cateora & L.Graham, 2007).

Berdasarkan penjelasan Bapak Tulus Warsito mengenai teori Rasional Integrasi yang berpengaruh terhadap hubungan satu komponen dengan komponen lainnya dalam upaya penyatuan dapat diaplikasikan kepada permasalahan ini sebagai berikut:

1. Diuntungkan

Bergabungnya komponen yang kecil dengan komponen yang besar dikarenakan komponen yang kecil merasa untung dan tidak merasa rugi.

2. Tidak dirugikan

Komponen kecil yang bergabung dengan komponen besar dengan kondisi tidak dirugikan, dimana komponen yang kecil tidak

mendapat kerugian maupun keuntungan yang signifikan dari hasil integrasi tersebut.

3. Kalau rugi di dalam satu hal, tetapi mendapat konsesi terhadap hal ini

Bergabungnya komponen yang kecil dengan komponen yang besar akan memberikan kerugian tertentu, namun komponen yang kecil mendapat konsesi tertentu dari hasil integrasi tersebut.

4. Tidak berdaya

Komponen yang kecil disaat bergabung dengan komponen yang besar tidak bisa memajukan kepentingannya sendiri dan hanya mengikuti kepentingan dari komponen yang besar tanpa adanya konsesi apapun (Warsito, 2018).

Bergabungnya Hong Kong kepada Tiongkok dianggap sebagai salah satu kerugian yang didapatkan oleh Hong Kong dibandingkan mendirikan negara sendiri. Namun walaupun Hong Kong mendapatkan kerugian, Hong Kong mendapatkan Konsesi dalam bentuk kebebasan otonomi yang sangat tinggi, Hong Kong dapat menggunakan sistem sendiri, mengatur perekonomian dan politik sendiri, melakukan pemilihan kepala pemerintahan sendiri kecuali urusan hubungan luar negeri seperti memiliki kedutaan sendiri dan hubungan diplomatik.

Hasil integrasi antara Hong Kong dan Tiongkok ini masuk kedalam bagian kuadran rasional integrasi yang ketiga. Dimana ditemukan bahwa terdapat kerugian yang diterima Hong Kong dari integrasinya dengan Tiongkok yang lalu berlanjut pada konsesi yang diberikan Tiongkok kepada Hong Kong. Hasil dari integrasi tersebut dibuktikan dengan status Hong Kong sebagai *Special Administration Region* (SAR).

## 2. Teori Pembangunan Ekonomi

Setiap negara memiliki kebutuhan dan ketergantungan antara sesama, dimana hal ini bertujuan kepada peningkatan sumber daya yang ada dalam suatu negara dan melakukan kerjasama dengan negara lain untuk memenuhi kekurangannya. Jalannya perekonomian di suatu negara tidak terlepas dari bagaimana pemerintah mampu meningkatkan seluruh sektor-sektor di wilayahnya dalam mendorong majunya ekonomi. Pembangunan ekonomi menjadi hal yang sangat

penting bagi setiap negara, dimana majunya perekonomian negara bisa diartikan sebagai gambaran masyarakatnya yang juga sejahtera.

Dalam bukunya yang berjudul, "*The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto*", ahli ekonomi dan politik Amerika Serikat Walt Whitman Rostow menyatakan bahwa,

“Pembangunan ekonomi atau proses transformasi suatu masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern merupakan sebuah proses multidimensional. Pembangunan ekonomi bukan berarti hanya dalam perubahan struktur ekonomi suatu negara tetapi juga ditunjukkan oleh peranan sektor pertanian dan peranan sektor industri. Pembangunan ekonomi berarti pula sebagai suatu proses yang menyebabkan antara lain: perubahan orientasi organisasi ekonomi, politik, dan sosial yang pada mulanya berorientasi pada suatu daerah menjadi berorientasi keluar, perubahan pandangan masyarakat mengenai jumlah anak dalam keluarga yaitu dari menginginkan banyak anak menjadi keluarga kecil, perubahan kegiatan investasi masyarakat, dari melakukan investasi yang tidak produktif (menumpuk emas, membeli rumah dan sebagainya) menjadi investasi yang produktif, perubahan sikap hidup dan adat istiadat yang terjadi, merangsang pembangunan ekonomi (misalnya penghargaan terhadap waktu, penghargaan terhadap prestasi perorangan).” (Rostow W. W., 1960)

Proses pembangunan ekonomi menurut Rostow bisa dibedakan dalam 5 tahap diantaranya: masyarakat tradisional, pra-kondisi tinggal landas, tinggal landas, menuju kedewasaan, era konsumsi tinggi. Tahapan-tahapan tersebut memberikan tawaran terperinci pada pengambilan kebijakan di suatu negara mengenai tahapan dan prasyarat dari pencapaian tahapan yang harus dilalui untuk menjadikan sebuah negara menjadi lebih maju. Kejelasan teori yang disampaikan Rostow ini melatarbelakangi banyak negara berkembang menerapkan teori ini dalam pembangunan mereka.

Rostow menyampaikan petunjuk-petunjuk jelas mengenai cara praktis dalam memperoleh sumber daya sebagai modal mencapai tingkat investasi produktif yang tinggi. Cara tersebut disajikan dalam berbagai alternatif, yaitu: dana investasi dari pajak yang tinggi, dana

invesatasi dari pasar uang atau pasar modal, keuntungan yang didapat dari perdagangan internasional, dan investasi langsung modal asing.

Aplikasi dari teori ini dalam kasus yang diangkat di sini adalah, bahwa Hong Kong yang menggunakan sistem pemerintahan demokrasi yang tidak sama dengan Tiongkok yang menggunakan sistem pemerintahan komunis. Pembangunan ekonomi di wilayah Hong Kong sangatlah maju dan lebih maju daripada wilayah Tiongkok yang lain, dimana ketika wilayah ini kembali bergabung dengan Tiongkok, Beijing menjadikan Hong Kong sebagai *Special Administrative Region*, dimana disinilah Hong Kong dianggap lebih mampu memposisikan dirinya sebagai salah satu pusat ekonomi di Asia.

Kemajuan ekonomi Hong Kong dapat dilihat dari tahap yang sudah dilaluinya. Dari lima tahap yang dijelaskan oleh Rostow, bahwa Hong Kong sudah mencapai tahap kelima yaitu era konsumsi tinggi. Inilah yang menjadi perbedaan antara Hong Kong dengan wilayah lain Tiongkok, dimana wilayah lain masih berada di tahap satu sampai empat. Inilah yang menjadi bukti dimana Hong Kong dengan ekonomi kapitalisnya mampu lebih maju daripada wilayah Tiongkok yang lain, dimana hal ini ditunjukkan dengan perilaku masyarakat Hong Kong yang memiliki biaya hidup yang lebih tinggi yang ditunjukkan dengan mahalnya harga properti dan pengeluaran harian di Hong Kong dibanding dengan wilayah Tiongkok yang lain.

#### **D. Hipotesis**

Berdasarkan hubungan antara latar belakang masalah dengan kerangka pemikiran, penulis menemukan dua indikator mengapa Tiongkok memberikan status SAR kepada Hong Kong, yaitu sebagai berikut:

1. Adanya implikasi dari penerapan kebijakan *One Country Two System* terhadap proses integrasi antara Tiongkok dan Hong Kong.
2. Hong Kong memiliki perekonomian yang berkembang sangat pesat dan lebih maju dibandingkan dengan wilayah Tiongkok yang lain. Hong Kong juga mampu menjadi wilayah yang memiliki pendapatan nasional bruto (PNB) perkapita tinggi di dunia yang berfungsi sebagai jembatan penghubung pembangunan dengan wilayah Tiongkok lainnya.

## **E. Tujuan Penelitian**

Adapun dalam sebuah penelitian ilmiah senantiasa terdapat tujuan penelitian. Oleh sebab itu terdapat beberapa tujuan dalam penelitian ini diantaranya adalah :

1. Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan lebih dalam mengenai alasan mengapa Hong Kong dijadikan sebagai daerah SAR ( Special Region Administrative ) dinegara Tiongkok.
2. Penelitian ini menjadikan salah satu sarana penulis untuk mengaplikasikan teori-teori yang telah penulis pelajari selama mengikuti proses perkuliahan dan menjadi salah satu bentuk pendalaman ilmu yang telah diperoleh.
3. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis lebih dalam mengenai hal-hal seperti penerapan konsep satu negara dua sistem di Tiongkok, pengaruh kemajuan ekpnomi Hong Kong terhadap kemajuan ekonomi Tiongkok secara keseluruhan, dan tujuan pembangunan jangka panjang yang ingin dicapai oleh Tiongkok.
4. Penulis ini bertujuan untuk menjelaskan lebih dalam mengenai posisi Hong Kong dalam pembangunan ekonomi Tiongkok, dana pentingnya Hong Kong dalam mendorong pembangunan ekonomi Tiongkok.
5. Ditujukan untuk memenuhi persyaratan akademis untuk menyelesaikan studi kesarjanaan (strata 1) Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

## **F. Jangkauan Penelitian**

Skripsi ini akan membahas mengenai posisi Hong Kong dalam pembangunan ekonomi negara Tiongkok mulai dari tahun 1982 sampai tahun 1997. Skripsi ini juga akan membahas mengenai bagaimana pemerintah Tiongkok menerapkan sistem wilayah administrasi khusus (SAR) di Hong Kong dan hubungannya dengan sistem negara kesatuan yang dianut oleh Tiongkok. Unis analisa dalam penulisan skripsi ini berada dalam tingkat negara (Tiongkok). Skripsi ini menambahkan data-data di luar batas jangkauan penelitian yang masih memiliki relevansi terhadap batasan skripsi ini.

## **G. Metodologi Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui pencarian untuk pertanyaan rumusan

masalah yang telah diajukan agar dapat terjawab dengan baik, dengan metode sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis Penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menjelaskan suatu persoalan dengan mencari fakta-fakta yang terjadi untuk dapat menghasilkan sebuah kesimpulan yang akurat terhadap kasus yang diteliti.

#### 2. Jenis Data

Jenis data yang akan dipakai pada penelitian ini mendasar pada data sekunder, yang berarti data diperoleh dari hasil atau bahan-bahan dokumenter tentang obyek penelitian seperti buku, jurnal ilmiah, dan berita dari surat kabar maupun internet .

#### 3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini akan menggunakan teknik kapustaka (library research). Sesuai dengan penggunaan data sekunder maka pencarian data akan difokuskan data-data pustaka yang akan di seleksi kemudian dianalisis untuk mendapatkan hasil yang baik.

#### 4. Analisis Data

Analisis data adalah data yang diperoleh dari penelitian ini akan disusun secara sistematis dan logis. Kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

### H. Sistematika Penulisan

Penulisan yang sistematis merupakan salah satu syarat mutlak penulisan yang ilmiah, karena itu baik dan buruknya hasil penelitian akan sangat ditentukan atau bagaimana cara menyajikan hasilpenelitian tersebut. Adapun sitematika yang terdapat dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

**BAB I** : merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, hipotesis, metedologi penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II** : membahas mengenai kemajuan ekonomi Hong Kong dan posisinya sebagai pusat ekonomi terpenting di Tiongkok.

**BAB III** : membahas mengenai kebijakan administrasi *One Country Two System* negara Tiongkok.

**BAB IV** : Membahas mengenai keunggulan dan faktor-faktor penentu Hong Kong sebagai wilayah administratif khusus.

**BAB V** : merupakan kesimpulan atau penutup dari pembahasan bab-bab sebelumnya yang berisi ringkasan mengenai susunan penelitian dalam skripsi ini dari seluruh hal yang telah dijelaskan di bab-bab sebelumnya.

## **BAB II**

# **KEMAJUAN EKONOMI HONG KONG DAN POSISINYA SEBAGAI PUSAT EKONOMI TERPENTING DI TIONGKOK**

Di dalam bab ini akan membahas mendalam tentang sejarah Hong Kong yang meliputi dimulainya perang Candu yang terjadi di Tiongkok dan dampaknya terhadap penyerahan Hong Kong kepada Inggris serta proses kembalinya Hong Kong kepada Tiongkok. Selain itu akan dibahas pula terkait kemajuan perekonomian Hong Kong dan posisinya sebagai pusat ekonomi terpenting di Tiongkok dilihat dari kondisi perekonomian Hong Kong ketika masih menjadi wilayah kolonial Inggris dan Hong Kong di era paska kolonial.

### **A. Sejarah Hong Kong**

Hong Kong merupakan salah satu wilayah yang memiliki sejarah yang banyak dikenal oleh seluruh dunia, tidak hanya dari bagaimana kemajuan yang dimiliki akan tetapi termasuk bagaimana proses perkembangan wilayahnya baik dari sisi politik, sosial dan terutama ekonomi. Sejarah Hong Kong, sebuah pelabuhan bisnis yang terletak di lepas pantai tenggara Eurasia. Temuan arkeologi menunjukkan bahwa kawasan ini telah dihuni sejak Zaman Batu Tua, dan kemudian dengan penggabungannya ke dalam kerajaan China selama dinasti Qin (221-206 SM). Dimulai sebagai desa nelayan nelayan dan lokasi produksi garam, Hong Kong kemudian berkembang menjadi pelabuhan bebas penting dan akhirnya menjadi pusat keuangan internasional utama (Hong Kong Government, 2016).

Hong Kong sebagai suatu wilayah yang memiliki kebebasan otonomi yang sangat tinggi dan memiliki keistimewaan yang telah diberikan oleh Tiongkok. Kebebasan dan keistimewaan yang diberikan dari Tiongkok kepada Hong Kong ini merujuk kepada perkembangan dan sistem ekonomi Hong Kong yang sudah berjalan sejak Hong Kong menjadi daerah koloni Inggris (Hung, 2015).

#### **1. Ekonomi Hong Kong Pada Masa Kolonial**

Sejarah mula yang sangat berdampak terhadap kemajuan ekonomi Hong Kong adalah perang Candu. Perang Candu, Perang Opium berasal dari bahasa Tionghoa yaitu 鴉片战争 atau didalam karakter tradisionalnya yaitu 鴉片戰爭 dan di penulisan pinyinnya yaitu Yāpiàn Zhànzhēng, juga disebut Perang Anglo-Tiongkok.

Perang Candu merupakan dua perang yang terjadi pada pertengahan abad ke-19 yang berlangsung dari tahun 1839 - 1842 dan 1856 – 1860, perang ini terjadi antara orang Tiongkok dan orang Inggris di kedaulatan Tiongkok. Pada perang tersebut pedagang Eropa menggunakan kekuatan adiktif candu untuk memperoleh hubungan dagang penting dengan Tiongkok, negara yang mengisolasi diri dari dunia luar (William Travis Hanes, 2002).

Nama “Candu” pada perang ini dikarenakan adanya perbedaan pendapat antara Dinasti Qing dan Inggris mengenai perdagangan Candu di daratan Tiongkok. Konflik bersenjata yang berlangsung dua kali di Tiongkok sekitar pertengahan abad ke-19 antara kekuatan negara-negara barat dan Dinasti Qing (1644-1912) yang memerintah Tiongkok. Meskipun perang opium pertama dimulai pada tahun 1839, "tembakan pertama" dalam konflik terjadi hampir setengah abad sebelumnya, ketika utusan Inggris ke kaisar Qianlong, costom yang diterima oleh setiap negara lain yang melakukan bisnis dengan pasar besar Tiongkok (William Travis Hanes, 2002).

Perang Opium terjadi pada tahun 1839 sampai 1842 dan 1856 sampai 1860 menandai sebuah tahap baru dalam hubungan China dengan Barat. Kekalahan militer China dalam perang ini memaksa para penguasa untuk menandatangani perjanjian yang membuka banyak pelabuhan untuk perdagangan luar negeri. Pembatasan yang diberlakukan di bawah sistem Kanton dihapuskan. Opium, meski ada larangan kekaisaran, kini menjadi barang biasa. Saat opium membanjiri China, harganya turun, konsumsi lokal meningkat dengan cepat, dan obat tersebut menembus semua lapisan masyarakat. Di pelabuhan-pelabuhan perjanjian baru, pedagang asing berkolaborasi dengan beragam pedagang Cina yang lebih banyak daripada di bawah sistem Kanton, dan mereka berkelana jauh ke dalam interior Cina. Misionaris membawa ajaran Kristen kepada penduduk desa, dilindungi oleh hak diplomatik yang diperoleh berdasarkan perjanjian. Permusuhan yang populer pada orang asing baru mulai meningkat.

Tidak mengherankan, sejarawan China menganggap kedua Perang Opium sebagai pemaksaan kekuasaan asing yang tidak adil terhadap kerajaan Qing yang melemah. Pada abad ke-20, Republik China melakukan upaya keras untuk menghapus apa yang disebutnya "perjanjian yang tidak setara." Ini berhasil menghapus sebagian besar dari mereka dalam Perang Dunia II, namun fase imperialisme asing ini berakhir sepenuhnya dengan kembalinya Hong Kong ke Cina pada tahun 1997. Buku teks konvensional bahkan menandai dimulainya

sejarah Cina modern dari akhir Perang Opium pertama di tahun 1842 (Perdue, 2011).

Sebagai klimaks dari sengketa perdagangan antara Tiongkok dibawah Dinasti Qing dengan Inggris. Penyeludupan opium Inggris dari India ke Tiongkok dan usaha pemerintah Tiongkok menerapkan hukum obat-obatannya menyebabkan konflik militer. Inilah beberapa hal yang sangat berpengaruh terhadap munculnya perang Candu dan menjadi faktor Hong Kong menjadi daerah kolonial Inggris. Sehingga pada akhirnya Tiongkok kalah dalam berperang dan harus menyerahkan Hong Kong kepada Inggris sebagai salah satu wilayah kolonial.

**Gambar 2.1**  
**Pertumbuhan besar ekspor opium Inggris ke Tiongkok antara 1729**



Sumber :

[https://ocw.mit.edu/ans7870/21f/21f.027/opium\\_wars\\_01/ow1\\_essay01.html](https://ocw.mit.edu/ans7870/21f/21f.027/opium_wars_01/ow1_essay01.html)

Kapal layar cepat baru yang disebut kapal pemotong, dibangun dengan dek sempit, area layar besar, dan beberapa tiang, pertama kali muncul di Pasifik pada tahun 1830-an dan sangat merangsang perdagangan teh. Mereka membawa lebih sedikit muatan daripada Indomin Timur yang besar, tapi bisa membawa teh segar ke pasar Barat lebih cepat. Kapal-kapal *Clipper* juga terbukti sangat nyaman untuk menyelundupkan opium, dan secara terbuka dan populer diidentifikasi sebagai "Gunting Opium." Kapal seperti *Red*

*Rover* bisa membawa opium dengan cepat dari Calcutta ke Canton, menggandakan keuntungan pemilik mereka dengan melakukan dua pelayaran setahun.

Di Canton, larangan Qing telah memaksa para pedagang untuk menarik diri dari Macau dan Whampoa dan mundur ke pulau Lintin, di pintu masuk Sungai Pearl, di luar wilayah hukum pejabat setempat. Di sana para pedagang menerima kiriman opium dari India dan menyerahkan peti tersebut ke kapal-kapal kecil China dan perahu dayung yang disebut "Kepiting Cepat" dan "Naga yang Mengacak," untuk didistribusikan ke pelabuhan-pelabuhan kecil di sepanjang pantai. Kapal penyelundup lokal yang kedua terkadang didorong oleh dua atau lebih dayung di setiap sisinya.

**Gambar 2.2**  
**Delta Sungai Mutiara**



Sumber :

[https://ocw.mit.edu/ans7870/21f/21f.027/opium\\_wars\\_01/ow1\\_essay01.html](https://ocw.mit.edu/ans7870/21f/21f.027/opium_wars_01/ow1_essay01.html)

Sumber India utama opium Inggris yang menuju ke China adalah Patna di Bengal, tempat obat tersebut diproses dan dimasukkan ke dalam peti berisi sekitar 140 kilogram. Aliran tahunan ke China sekitar 4.000 peti tahun 1790, dan sedikit lebih dari dua kali lipat pada awal 1820-an. Impor mulai meningkat pesat di tahun 1830-an, bagaimanapun, karena agitasi "perdagangan bebas" mendapat kekuatan di Inggris dan monopoli Perusahaan Hindia Timur mengenai perdagangan China mendekati tanggal penghentiannya (tahun 1834).

Perusahaan menjadi lebih bergantung dari pada pendapatan opium, sementara pedagang swasta segera meningkatkan kepemilikan mereka dalam perdagangan yang menguntungkan. Pada malam perang opium pertama, Inggris mengirimkan sekitar 40.000 peti ke China setiap tahunnya. Pada tanggal ini, diperkirakan ada sekitar sepuluh juta perokok opium di China, dua juta di antaranya pecandu. (Pedagang Amerika mengirim sekitar 10.000 peti antara 1800 sampai 1839) (Perdue, 2011).

#### **i. Perang Candu I (1839-1842) dan Perjanjian Nanking**

Perang Candu I sebagian besar berlangsung di pantai dan di laut. Pada perang tersebut kapal-kapal Inggris yang notabene lebih modern dari kapal-kapal Tiongkok, membombardir pantai tenggara Tiongkok. Pada awal perang ini ditandai dengan adanya penyerangan dari Inggris kepada Tiongkok, melihat dari bagaimana posisi awal Tiongkok yang sangat masih berada dalam perkembangan dan memulai kebangkitan dalam ekonomi namun dihadang oleh permasalahan ini.

Keunggulan persenjataan membuat armada Inggris dengan mudah menguasai kota-kota pelabuhan Xianggang (Hongkong), Kanton, Xiamen, Ningbo, Fuzhou dan Shanghai. Bahkan, pada bulan Agustus 1842, dengan kekuatan 80 kapal perang, mereka maju menuju Nanjing. Di tengah kondisi Tiongkok yang semakin terdesak. Kaisar Daoguang tidak menemukan jalan yang lebih baik selain menyerah kepada pihak Inggris. Pemerintah Tiongkok dipaksa menyetujui Perjanjian Nanjing, yang banyak merugikan mereka (Wicaksono, 2015).

Berikut point-point penting dari perjanjian Nanjing:

1. Tiongkok menyewakan Xianggang (Hongkong) pada Inggris.
2. Pelabuhan-pelabuhan Kanton, Xiamen, Ningbo, Fuzhou, dan Shanghai harus dibuka bagi perdagangan dengan pihak Inggris.
3. Tiongkok diwajibkan membayar kerugian perang sebesar 21 juta mata uang perak.
4. Memberikan hak istimewa bagi Inggris, serta membuka daerah khusus (ekstrateritorial) sebagai tempat tinggal warga Inggris.
5. Hubungan antara pejabat-pejabat Tiongkok dan Inggris harus berdasarkan asas sama rata.
6. Inggris berhak mengangkat konsul di tiap-tiap pelabuhan yang dibuka bagi aktivitas perdagangan mereka (Wicaksono, 2015).

Perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 29 Agustus 1842, sama sekali tidak menyelesaikan masalah penyelundupan candu. Penyelundupan masih berlangsung, meskipun secara resmi tetap dilarang. Setelah perjanjian Nanjing tercetus, Amerika Serikat juga menuntut hak yang sama dengan Inggris. Amerika mengirimkan utusan bernama Caleb Cushing untuk merundingkan hal itu dengan pemerintah Tiongkok. Usaha Cushing berhasil, Tiongkok dan Amerika menyepakati perjanjian bilateral pada tahun 1844. Perjanjian tersebut membuat Amerika mendapatkan pula seluruh hak istimewa yang didapatkan Inggris (Jacques, 2011).

Di dalam perjanjian bilateral ini, hakim-hakim Tiongkok tidak memiliki wewenang untuk mengadili warga Amerika yang melakukan pelanggaran hukum dan harus menyerahkannya pada pengadilan konsulat Amerika. Selain Amerika, Prancis juga menyusul mendakan perjanjian bilateral dengan Tiongkok pada tahun yang sama guna memperoleh hak-hak istimewa. Sebagai hasilnya, Tiongkok mengizinkan penyebaran agama Katolik dan mengembalikan hak milik gereja yang telah dilarang seabad sebelumnya (Ruck, 2008).

## **ii. Perang Candu II (1856-1860 M)**

Perang Candu II dapat dianggap sebagai kelanjutan dari ambisi imperialisme Eropa di Tiongkok. Pihak Eropa yang telah mendapatkan hak-hak dagang khusus di Tiongkok, masih berambisi untuk memperluas kekuasaannya. Pihak Inggris ingin memperkuat pengaruhnya di Tiongkok dengan memaksa Dinasti Qing memperluas wilayah perjanjian Nanjing. Pada tahun 1854, mereka menuntut seluruh Tiongkok dijadikan wilayah dagang terbuka bagi East India Company, perdagangan candu dilegalkan, dan diperbolehkannya duta besar Inggris ditempatkan di Beijing (William Travis Hanes, 2002).

Tuntutan serupa juga datang dari Amerika Serikat dan Prancis. Akan tetapi, pemerintah Dinasti Qing menolak semua tuntutan tersebut, sehingga hubungan Tiongkok dan Barat menjadi memanas. Meskipun demikian, Perang Candu II secara khusus dipicu oleh tindakan pejabat Dinasti Qing yang menghentikan kapal bernama Arrow, kapal Tiongkok yang telah diregistrasi di Hongkong (kapal tersebut dikapteni orang Inggris dan seluruh awaknya merupakan warga Tiongkok). Telah menjadi kebiasaan, jika kapal Tiongkok hendak menyelundupkan sesuatu, mereka meregistrasikan terlebih dulu kapalnya di Hongkong, sehingga dapat berlayar di bawah bendera Inggris dan terhindar dari jeratan hukum Tiongkok (Beeching, 1975).

Pada tanggal 8 Oktober 1856 kapal tersebut berlabuh di Kanton. Pada pagi harinya, mereka dihentikan oleh 4 pejabat dan 60 pasukan bersenjata. Mereka mencurigai Arrow hendak menyelundupkan sesuatu ke wilayah Tiongkok. Kapten kapal mendatangi konsulat Inggris untuk melaporkan penahanan yang dilakukan pejabat Tiongkok. Konsul Inggris, Harry Parkes, segera meresponnya dengan mendatangi pejabat Tiongkok yang melakukan penahanan serta memprotes tindakan mereka. Meskipun telah diprotes, 12 orang di antara awak kapal itu tetap ditahan karena dianggap melakukan tindak kriminal penyelundupan. Pihak Inggris ngotot, bahwa kapal itu telah diregistrasi di Hongkong, oleh karena itu hukum khusus berlaku terhadap mereka, dan meminta agar kapal dan awaknya dibebaskan.

Pihak Tiongkok menolak permintaan Parker, karena gagal membebaskan para awak Konsul Inggris kembali ke kantornya dan menyurati Gubernur Ye Mingchen. Ia membuat tuduhan bahwa para pejabat Tiongkok telah menghina bendera Inggris. Selain itu, ia juga menuduh pihak Tiongkok telah melanggar perjanjian ekstrateritorial dengan Inggris. Parker juga mengirimkan surat kepada Gubernur Sir John Bowring dan Admiral Sir Michael Seymour di Hongkong, meminta Inggris menuntut permintaan maaf Tiongkok. Mungkin Parker melihat peristiwa ini sebagai salah satu kesempatan untuk memperluas imperialisme Inggris di Tiongkok.

Dari hasil penyelidikan pejabat Tiongkok yang berwenang mendapati bahwa sembilan di antara dua belas orang yang ditangkap tidak bersalah. Gubernur Ye dengan tenang dan sopan menjawab tuntutan sepihak Inggris. Dijelaskannya alasan penangkapan serta penyesalan terhadap kesalah-pahaman yang terjadi. Ia juga mengatakan tidak ada sedikit pun keinginan untuk menghina bendera Inggris. Gubernur Ye lalu menawarkan untuk menyerahkan 12 orang yang di tahan itu pada tanggal 12 Oktober 1856.

Akan tetapi, Parker menolak tawaran tersebut meskipun pihak Tiongkok telah menyampaikan rasa penyesalan. Ia tetap bersikeras agar Gubernur Ye mengeluarkan permintaan maaf secara tertulis serta pembebasan awak kapal yang tidak bersalah dengan segera. Ye merespon kesombongan pihak Inggris dengan menyatakan bahwa hukum ekstrateritorial hanya berlaku bagi kapal Inggris, sedangkan Arrow adalah kapal Tiongkok. Ia juga mempertanyakan kewenangan pihak Inggris untuk ikut campur urusan penangkapan warga negara Tiongkok oleh pejabat berwenangan Tiongkok, apalagi saat itu kapal

juga berada di perairan Tiongkok. Gubernur menyimpulkan insiden tersebut bukan lah merupakan pelanggaran perjanjian apa pun.

Pihak Inggris menolak penjelasan pihak Tiongkok di aas, meskipun bukti-bukti dan saksi menguatkan pembelaan Ye. Mereka tetap ngotot bahwa kapal itu tetap kapal Inggris dan warga negara mana pun yang berada di atas kapal Inggris berada di bawah naungan hukum Inggris.

Polemik ini terus berlanjut hingga tanggal 21 Oktober 1856, di mana sekali lagi Parker menuntut permintaan maaf Tiongkok. Keesokan harinya, Gubernur Ye mengirim para tahanan itu ke konsulat Inggris, termasuk yang terbukti bersalah melakukan penyelundupan, namun pihak Inggris menanggapi dingin usaha tersebut. Gubernur Ye tetap bersikeras tidak perlu mengeluarkan permintaan maaf, karena tidak ada pelanggaran yang dilakukan.

Setelah Tiongkok tidak kunjung meminta maaf, arogansi Inggris pun semakin menjadi. Mereka mengerahkan angkatan perangnya pada tahun 1857 untuk menggempur Kanton. Prancis ikut bergabung dengan Inggris setelah hukuman mati yang dijatuhkan terhadap seorang misionaris Prancis bernama August Chapdelaine.

Kanton berhasil dirbeut dan mereka bergerak menuju Beijing. Sementara itu, Kaisar Xianfeng (1851-1860) yang ketakutan melarikan diri ke Jehol. Perang Candu II baru berakhir setelah pihak Tiongkok bersedia menandatangani Perjanjian Tianjin pada bulan Juni 1858. Berikut isi dari perjanjian Tianjin:

1. Inggris, Prancis, Amerika, dan Rusia diizinkan membuka kedutaan di Beijing, yang saat itu merupakan kota tertutup bagi orang asing.
2. Sepuluh pelabuhan baru dibuka bagi bangsa Barat, termasuk Danshui, Hankou, Niuzhuang, dan Nanjing.
3. Pemberian izin kunjungan orang asing ke pedalaman Tiongkok, baik untuk urusan dagang atau kegiatan misionaris.
4. Tiongkok harus membayar kerugian perang sebesar 4 juta tail perak pada Inggris dan 2 jut apada Prancis.
5. Pelarangan menyebut bangsa Barat sebagai *yi* (barbar).

Walaupun perjanjian telah ditandatangani, kerajaan tetap tidak mengizinkan pendirian kedutaan di Beijing. Oleh karena itu, pada tahun 1860, kekuatan gabungan Inggris dan Prancis kembali melancarkan serangan, dan berhasil menaklukan Beijing pada tanggal 6 Oktober 1860. Kaisar Xiangfeng kembali melarikan diri ke istananya di Chengde, di mana sebelumnya ia telah memerintahkan Pangerang Gong untuk bernegosiasi dengan bangsa Barat.

Di saat yang bersamaan, bangsa Barat membakar istana kekaisaran dan menjarahnya. Untuk meredam kekejaman bangsa Barat, pangerang Gong menyampaikan kembali kesediaan Dinasti Qing untuk menjalankan seluruh isi perjanjian Tianjin dalam wujud Konvensi Beijing yang diratifikasi pada tanggal 18 Oktober 1860. Adapun isi dari ratifikasi adalah sebagai berikut:

1. Tiongkok mengakui kembali Perjanjian Tianjin.
2. Menjadikan Tianjin sebagai pelabuhan terbuka.
3. Kerugian yang harus diganti Tiongkok kepada Inggris dan Prancis ditingkatkan menjadi 8 juta nail perak.
4. Perdagangan candu dilegalkan.

Dengan keluarnya ratifikasi ini sekaligus mengakhiri sepenuhnya Perang Candu dan menjadikan candu sebagai barang yang legal di dataran Tiongkok.

Sejarah adanya perang Candu ini menjadi awal mula perebutan daerah Hong Kong oleh negara Inggris dan adanya peminjaman wilayah yang termasuk dampak dari perang Candu. Ketika Hong Kong telah direbut oleh Inggris sebagai wilayah kolonialnya, adanya perubahan beberapa sistem dan pemerintahan di Hong Kong. Atas kemenangan Inggris pada perang Candu berarti telah memulai imperialisme di Tiongkok dengan menduduki Hongkong. Hongkong oleh Inggris dijadikan pangkalan militer dan pelabuhan perdagangan. Hongkong merupakan tempat yang strategis karena terletak di muara sungai Yang Tze yang merupakan pintu utama masuk ke Tiongkok. Pada pertengahan abad ke- 19 merupakan puncak kemakmuran dan kemegahan bagi Inggris. Sebagai Negara industri dan Negara penjajah terbesar di dunia pada saat itu, Inggris menduduki tempat istimewa dalam percaturan politik ekonomi internasional.

Pada tahun 1842 Hong Kong dijadikan pangkalan militer Inggris, dikarenakan merupakan salah satu wilayah yang sangat strategis di Asia. Ketika era penjajahan Inggris, Hong Kong dikepalai oleh seorang guburnur yang merupakan pilihan ratu Inggris bernama Henry Pottinger dengan letak ibu kota di wilayah Victoria dan berstatus sebagai daerah kolonial Inggris. Pada masa kolonialnya, Inggris mencoba merubah kebijakan dan sistem ekonomi yang dimiliki oleh Hong Kong, sehingga Hong Kong lebih berkembang dan ekonominya semakin maju. Sebelum menjadi daerah kolonial Inggris, Hong Kong merupakan salah satu desa nelayan yang dikuasai oleh bajak laut pantai Tiongkok selatan (Hong Kong Government, 2016).

Hong Kong pada masa Dinasti Ming merupakan salah satu pusat perdagangan dan sangat banyak imigran dari negara Tiongkok yang datang untuk menetap di wilayah Hong Kong tersebut. Pada tahun 1860 Inggris mendapatkan wilayah tambahan sebagai koloni, yaitu semenanjung Kowloon, dan New Territories beserta 230 pulau didapat pada tahun 1898 dengan masa sewa 99 tahun.

Kolonialisme Inggris bersifat realis dimana Inggris melarang masyarakat Hong Kong dan Tiongkok untuk menetap di puncak Victoria yang memiliki pemandangan yang indah, dengan demikian Inggris menjadikan Victoria ini menjadi salah satu tempat villa mewah untuk pemukiman penjajah Inggris. Kedatangan imigran dari wilayah Tiongkok mendukung kemajuan Hong Kong sebagai pelabuhan perdagangan dan pusat industri. Perkembangan Ekonomi Hongkong tidak lepas dari kebijakn yang diterapkan oleh Inggris sebagai Negara Induknya, pendekatan *laissez fiare* ( biarkan rakyat bertindak sendiri ) telah menjadikan Hongkong sebagai kota pelabuhan yang maju.

Perjalanan Hong Kong berada dalam masa kolonial Inggris tidak terlepas dari konflik yang berhubungan dengan masyarakat Hong Kong, pada tahun 1966 terjadi pemberontakan anti kolonial setelah adanya bentrok antara penduduk Tiongkok dengan polisi ntang karcis dipelabuhan fery yang semakin naik. Pada tahun 1966 sampai 1968 adanya penyebaran revolusi kebudayaan juga menyebabkan kerusakan di Hong Kong dan telah memakan korban jiwa. Tata hukum yang berlaku di Hong Kong sama dengan tata hukum Inggris, perkembangan Hong Kong selain bidang ekonomi yaitu dalam bidang politik yang ditandai dengan adanya pemilu pertama pada tahun 1991 dan pemilu kedua pada tahun 1995 dan pada saat itu Partai Demokarasi menjadi partai yang terbesar di Hong Kong.

**Tabel 2.1**  
**Perubahan Ekonomi Hong Kong Tahun 1979 dan 1995**

|                      | <b>1979</b> | <b>1995</b> |
|----------------------|-------------|-------------|
| GDP (US \$ Biliar)   | 18.2        | 142.5       |
| GDP Perkapita (US\$) | 3,590       | 23,019      |
| GDP Sektor (Persen)  |             |             |
| Industri             | 32.0        | 16.8        |
| Manufaktur           | 23.8        | 9.3         |
| Pertanian            | 0.8         | 0.2         |
| Servis               | 67.2        | 83.0        |

|                                    |      |      |
|------------------------------------|------|------|
| Perdagangan luar negeri (Persen)   |      |      |
| Ekspor                             | 8.3  | 33.3 |
| Impor                              | 17.6 | 36.1 |
| Luar Pengelolaan                   | 0.0  | 82.0 |
| Pekerjaan menurut sektor (Persen)  | 44.0 | 15.0 |
| Industri                           | 34.0 | 60.0 |
| Servis                             |      |      |
| Perusahaan menurut sektor (Persen) | 32.0 | 11.0 |
| Industri                           | 68.0 | 89.0 |
| Servis                             |      |      |
| Investasi (US \$ Biliar)           |      |      |
| Hong Kong di Tiongkok              | 1.0  | 66.0 |
| Tiongkok di Hong Kong              | N.A. | 42.0 |
| Travel (Miliar)                    |      |      |
| Pengunjung dari Tiongkok           | 0.1  | 2.1  |
| Pendatang ke Tiongkok              | 3.0  | 26.4 |

Sumber : Cheng, J. Y. (1997). *The Other Hong Kong Report 1997*.

#### Hong Kong

Dilihat dari tabel diatas bahwasanya banyak sektor-sektor yang mengalami kemajuan di wilayah Hong Kong, perubahan ini dilihat pada era kolonial Inggris, bahwasanya dengan adanya pergantian sistem dan konsep yang disusun oleh Inggris dalam menjadikan Hong Kong sebagai salah satu kekuatan ekonomi di Asia. Peningkatan itu bukan hanya dikarenakan oleh bagaimana sistem yang dijalankan namun tetap ada campurtangan dari negara penjajah yaitu Inggris (Cheng J. Y., 1997).

## 2. Ekonomi Hong Kong Pada Masa Hak Kembali Kepada Tiongkok

Setelah melalui era kolonial yang dinyatakan dengan pengembalian Hong Kong kepada negara Tiongkok oleh Inggris, terdapat berbagai perjanjian dan persetujuan yang dibuat oleh ketika pihak ini (Fok, 2006). Pada 1 Juli 1997, dalam sebuah upacara yang dihadiri Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, Pangeran Charles dari Wales, Presiden Tiongkok; Jiang Zemin, dan Sekretaris Negara Bagian; Madeleine Albright secara resmi Hong Kong kembali ke pangkuan Negeri Tirai Bambu. Perayaan penyatuan Hong Kong ke Tiongkok dilakukan dengan damai meski sebagian warga Hong Kong saat itu memprotes keputusan tersebut.

Deklarasi bersama Inggris ditandatangani pada akhir 1984, membuka jalan bagi Hong Kong dibawah kendali Tiongkok pada tanggal 1 Juli 1997, dibawah kebijakan “satu negara, dua sistem”. Disepakati bahwa Hong Kong akan menjadi wilayah administratif khusus di negara Tiongkok, dengan perjanjian Hong Kong akan tetap dengan sistem dan jalannya selama 50 tahun (Philip R. Cateora, 2007). Pada tanggal 30 Juni 1997 merupakan hari terakhir pemerintahan Inggris di Hong Kong, sebuah upacara penyerahan berlangsung di Pusat Konvensi dan Pameran Hong Kong yang baru dibangun di Wan Chai..

Serah terima resmi dimulai dengan sebuah pidato perpisahan yang dibacakan oleh Pangeran Charles atas nama Ratu Elizabeth II. Beberapa menit sebelum tengah malam, bendera nasional Inggris dan bendera kolonial Hong Kong diturunkan saat lagu kebangsaan Inggris dimainkan, secara resmi mengakhiri pemerintahan kolonial Inggris di kota yang berpenduduk hampir 6,5 juta orang.

Setelah adanya penurunan bendera Inggris dilanjutkan dengan pengibaran bendera nasional Tiongkok dan bendera Hong Kong SAR yang baru diangkat ke lagu kebangsaan Tiongkok. Pertunjukan kembang api diluncurkan di Lapangan Tiananmen di Beijing dimana orang berkumpul untuk menyaksikan upacara tersebut. Perwakilan resmi serah terima untuk Inggris termasuk: Pangeran Charles, perdana menteri Tony Blair, sekretaris luar negeri Robin Cook, gubernur Hong Kong Chris Patten, dan kepala staf pertahanan Sir Charles Guthrie (South China Morning Post, 2016).

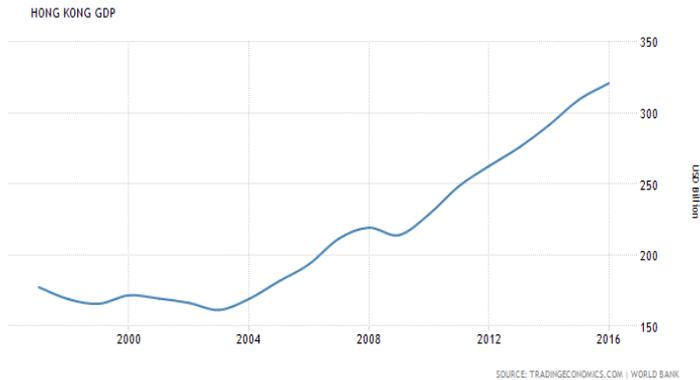
Pada era kolonial, Hong Kong sudah memiliki banyak kemajuan dalam berbagai bidang ekonomi maupun politik. Dapat dilihat dari berbagai pencapaian yang sudah diraih oleh Hong Kong dan bentuk dari pergerakan ekonominya yang mampu menjadikan Hong Kong sebagai pusat perekonomian Asia. Setelah era kolonial, Hong Kong mendapatkan kebijakan khusus dari negara Tiongkok yaitu *One Country Two System* dimana Hong Kong memiliki kebebasan dalam menjalankan sistem yang ada di wilayahnya sesuai dengan sistem yang sudah diterapkan oleh Inggris pada era kolonial. Hong Kong dengan menjadi wilayah administratif khusus di Tiongkok dapat meningkatkan pertumbuhan ekonominya dengan cepat dan kemajuannya dalam berbagai sektor.

Kemajuan ekonomi Hong Kong paska kolonial menjadi salah satu gambaran baru di kawasan Asia, dengan sistem yang berbeda dengan negara Tiongkok menjadikan Hong Kong lebih leluasa dalam mengembangkan wilayahnya baik dalam pendapatan perkapita,

penyediaan jasa, penanaman saham dan kerjasama dengan negara-negara lain. Sangat banyak betuk dorongan yang diberikan oleh Inggris ketika era kolonial yang memberikan banyak dampak dalam perkembangan ekonomi dan politik Hong Kong. Hong Kong dengan ukuran wilayah yang tidak terlalu besar dibandingkan dengan beberapa wilayah lain di Tiongkok akan tetapi mampu mengambil simpati banyak negara dalam penyediaan tempat investasi dan pasar.

Hong Kong memiliki peningkatan yang sangat drastis , *Hong Kong's Gini coefficient* telah naik ke rekor tertinggi, dari 0,518 di tahun 1996 menjadi 0,539 pada tahun 2016. Demikian juga, harga perumahan telah menjadi sangat tidak terjangkau, dengan harga rumah rata-rata adalah 18 kali pendapatan rumah tangga rata-rata, menjadikan Hong Kong sebagai wilayah dengan rasio tertinggi di dunia. Dapat dilihat peningkatan GDP Hong Kong dari diagram dibawah ini:

**Tabel 2.2**  
**Perkembangan GDP Hong Kong**



Sumber : TRADINGECONOMICS.COM | WORLD BANK

Menurut diagram diatas dapat disimpulkan bahwa Hong Kong mengalami peningkatan yang sanagt signifikan setiap tahunnya walaupun masih ada penurunan. Diagram yang dilansir oleh *World Bank* ini menyatakan GDP hong Kong mampu mencapai level yang tinggi, sedangkan negara Tiongkok masih berada dibawah.

## B. Pentingnya Peran Hong Kong Dalam Pembangunan Ekonomi Tiongkok

Hong Kong adalah salah satu wilayah yang sangat maju di negara Tiongkok, bukan hanya Hong Kong namun ada beberapa wilayah lain seperti Macau, Shanghai, Guangzhou, Beijing dan lainnya yang juga sangat maju serta berkontribusi dalam memajukan perekonomian Tiongkok secara keseluruhan. Kemajuan perekonomian Hong Kong berdampak sangat baik kepada pertumbuhan ekonomi Tiongkok baik dari segi sektor-sektor unggulan, pasar, investasi, pembangunan infrastruktur dan lainnya. Kemajuan perekonomian Hong Kong menggunakan sistem yang berbeda dengan Tiongkok mampu memberikan dampak yang lebih terhadap kemajuan ekonomi Tiongkok dibandingkan dengan era sebelum bergabungnya Hong Kong dengan Tiongkok.

Beberapa hal yang menjadikan Hong Kong sebagai salah satu wilayah bagian penting di Tiongkok yaitu Hong Kong menganut sistem perdagangan bebas, dengan menjadikan dirinya sebagai pusat keuangan internasional, 90% perekonomian Hong Kong ditopang oleh sektor jasa. Selain itu ekspor dan impor Hong Kong juga berdampak kepada pertumbuhan ekonomi Tiongkok.

Dalam perkembangannya perekonomian Hong Kong semakin berkorelasi dengan sektor eksternal Daratan Tiongkok, meskipun secara keseluruhan tidak hanya dalam bidang ekonomi tetapi juga dalam bidang-bidang lain. Integrasi Hong Kong dengan daratan Tiongkok akan semakin mempererat hubungan dengan semakin luasnya akses yang dibuka oleh WTO (*World Trade Organization*). Dalam beberapa tahun ke depan, Hong Kong akan mendapatkan keuntungan dari meningkatnya perdagangan Antara Daratan Tiongkok dan Negara-negara lainnya. Ekspor yang dilakukan oleh Tiongkok masih menjadi penyumbang kecil di dunia, akan tetapi pada tahun 2020 diharapkan Tiongkok mengalami kenaikan sebesar 10% (Wong, 2002). Hal ini menjadi peran yang sangat penting bagi Hong Kong untuk memberikan kontribusinya dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian Tiongkok melalui sektor-sektor yang telah dibangun oleh Hongkong.

**Tabel 2.3**  
**Saham Global Ekspor Terpilih dalam Presentase, 2020**

| <b>Negara</b> | <b>Presentase (%)</b> |
|---------------|-----------------------|
| Tiongkok      | 4.0                   |
| Japan         | 7.7                   |

|                |      |
|----------------|------|
| Asia NIEs*     | 7.7  |
| France         | 5.2  |
| Germany        | 8.8  |
| United Kingdom | 4.5  |
| United State   | 12.4 |

Sumber : IMF, Direction of state statistics

(\*) : Korea, Singapore, Taiwan, Hongkong

Investor terbesar di Tiongkok FIE (*Foreign-Invested Enterprises*) berasal dari Hong Kong. Dewan Pembangunan Perdagangan Hong Kong memperkirakan bahwa pada akhir bulan April 1999, ada 180.653 Proyek investasi yang didanai Hong Kong di Tiongkok, mewakili hampir 55 persen dari semua proyek investasi asing di negara ini. Sebagian besar proyek berada di manufaktur untuk ekspor. Jumlah investasi masing - masing relatif kecil. Investasi pada proyek impor / ekspor adalah juga terkait erat dengan produksi. Bagian terbesar investasi dilakukan di Provinsi Guangdong. Pada tahun 2001, Guangdong menerima FDI (*Foreign Direct Investment*) sebesar US \$ 15,7 miliar. Investasi dari Hong Kong telah menyumbang 60 persen dari semua total pada tahun 2001. Di tahun-tahun sebelumnya, Hong Kong berkontribusi bahkan lebih tinggi yaitu 70 persen sampai 80 persen. Proporsi sekarang lebih rendah karena ekonomi Guangdong telah menjadi lebih besar dan lebih banyak dana dari bagian lain dunia yang mengalir pada tingkat yang lebih cepat. Apa yang ditunjukkan oleh angka kebiasaan Tiongkok adalah bahwa FIEs merupakan bagian yang paling signifikan perkembangannya dalam produksi industri ringan di Tiongkok.

Investasi Manufaktur Hong Kong di Kawasan Delta Sungai Mutiara melakukan survey terhadap 123.000 perusahaan manufaktur dan perusahaan yang berbasis ekspor-impor di Indonesia. Hong Kong melakukannya pada bulan April 2002, dan menemukan sekitar 63.000 perusahaan (atau 53 persen) memiliki operasi manufaktur di daratan Tiongkok. 123.000 perusahaan melibatkan 477.000 pekerja di Hong Kong, 63.000 perusahaan dengan operasi manufaktur di Daratan mempekerjakan 389.000 pekerja di Hong Kong. Diperkirakan 22 persen (atau 27.000 perusahaan) manufaktur dan perusahaan ekspor impor telah berinvestasi di fasilitas pabrik di Daratan, 26 persen (atau 32.000) memiliki pengelolaan dan pengendalian operasi fasilitas pabrik, dan 23 persen (atau 28.000) telah membuat pengaturan pemrosesan subkontrak dengan pabrik di Daratan.

**Tabel 2.4**  
**Perkiraan Jumlah Perusahaan dengan Kegiatan di Tiongkok Daratan**

|                  | Fasilitas pabrik yang telah mapan  |  | Membuat pengaturan pemrosesan subkontrak dengan perusahaan investasi asing dan lokal | Memiliki beberapa kegiatan ekonomi di Tiongkok daratan | Tidak memiliki aktivitas ekonomi di Tiongkok daratan |
|------------------|------------------------------------|--|--|--|--|
|                  | Diinvestasikan di fasilitas pabrik | Memiliki manajemen dan pengendalian operasi fasilitas pabrik |  |  |  |
| Semua Perusahaan | 27.000                             | 32.000   | 28.000   | 63.000   | 60.000   |
| Manufaktur       | 3.000                              | 3.000  | 3.000  | 7.000  | 13.000   |
| Ekspor-Import    | 24.000                             | 29.000   | 25.000   | 56.000   | 47.000   |

Sumber : Wong, Y.-C. R. (2002). *The Role of Hong Kong in China's Economic Development*. Hongkong: University of Hongkong.

Hong Kong memiliki peran penting dalam kemajuan ekonomi Tiongkok. Setelah kembalinya Hong Kong ke pangkuan Tiongkok, Tiongkok memiliki kemajuan yang cukup pesat dalam perekonomiannya. Hong Kong merupakan pintu kemajuan dan tempat penyaluran barang terpenting bagi Tiongkok, Hong Kong juga menjadi sumber investasi terbesar di daratan Tiongkok, dan Hong Kong adalah sebagai pusat penggalangan modal pantai lepas utama untuk perusahaan Tiongkok. Kemudian sebaliknya Tiongkok juga merupakan sumber investasi eksternal terbesar bagi Hong Kong (Hong Kong Trade Development Council, 2018). Inilah yang menjadi peran penting Hong Kong dalam pembangunan ekonomi Tiongkok, sehingga kembalinya Hong Kong ke pangkuan Tiongkok merupakan salah satu pintu untuk kemajuan ekonomi serta Tiongkok juga mampu menjadi pemeran penting ekonomi di dunia, walaupun harus menjadikan Hong Kong sebagai wilayah administratif khusus.

### **BAB III**

## **KEBIJAKAN ADMINISTRASI *ONE COUNTRY TWO SYSTEM* DI NEGARA TIONGKOK**

Di dalam bab ini membahas mendalam tentang sejarah kebijakan administrasi *One Country Two System* (Satu Negara Dua Sistem) di negara Tiongkok. Pembahasan ini dimulai dari sejarah awal mula dirumuskannya kebijakan ini, dilanjutkan dengan tujuan dari perumusan kebijakan administrasi *One Country Two System* oleh pemerintahan Tiongkok. Dalam bab ini juga dibahas mengenai hubungan perumusan kebijakan satu negara dua sistem dengan Taiwan dan Hong Kong dan bagaimana proses integrasi yang dilakukan oleh Tiongkok kepada Taiwan dan Hong Kong sebagai bentuk dari kepentingan Tiongkok untuk mempertahankan kesatuan negaranya.

Pembahasan ini akan difokuskan pada bagaimana proses integrasi yang menjembatani Tiongkok untuk mencapai kepentingannya terhadap Hong Kong. Dengan adanya kepentingan Tiongkok terhadap Hong Kong, Tiongkok berusaha memberikan kebebasan otonomi sebagai salah satu bentuk integrasi yang dilakukan agar Hong Kong mau bergabung dengan Tiongkok. Hong Kong dijadikan sebagai wilayah administratif khusus (SAR) oleh Tiongkok sebagai bukti keseriusan Tiongkok dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan eksistensi dimata dunia. Dan yang terakhir akan dijelaskan fungsi dari *One Country Two System* sebagai bentuk dari kebijakan baru di Tiongkok setelah *One China Policy* yang sampai sekarang juga masih tetap berlaku.

#### **A. Sejarah *One Country Two System***

*One Country Two System* merupakan kebijakan administrasi yang dianut oleh Tiongkok selain kebijakan administrasi *One China Policy*. Kebijakan administrasi *One China Policy* dalam bahasa Mandarin yaitu “一个中国政策” ( Yi Ge Zhong Guo Zheng Che) yang berartikan Satu Tiongkok, harga mati bagi Tiongkok bahwa Taiwan masih berada di bawah teritori China dan negara lain harus menghormati dan mengakui kebijakan tersebut serta mengakui posisi Tiongkok bahwa dengan hanya memilih satu pemerintahan apabila ingin tetap bekerjasama dengan Tiongkok.

Kebijakan ini merupakan suatu prinsip yang menegaskan bahwa Taiwan dan Tiongkok daratan adalah satu bagian yang tidak

dapat dipisahkan dari satu “Tiongkok” (Chiang, 2004). Akan tetapi pada konsensus tahun 1992 terdapat modifikasi dari *kebijakan One China Policy* yang lebih tergantung kepada partai politik utama yang berkuasa. Prinsip ini mendapat perlawanan dari masyarakat Taiwan (Pendukung Gerakan Kemerdekaan Taiwan) yang mendorong untuk mendirikan “*Republic Of Taiwan*” dan menumbuhkan identitas terpisah dengan Tiongkok daratan yang disebut “*Taiwanization*”. Dengan adanya permasalahan tersebut maka pihak pemerintahan berusaha untuk mencari menyatukan kembali dengan merumuskan kebijakan baru *One Country Two System* ini.

“*One Country Two System*” dalam bahasa Mandarin yaitu 一国两制 ( Yi Guo Liang Zhi) yang berarti satu negara dua sistem adalah sebuah kebijakan baru yang diadopsi pada tahun 1970 an dan pertama kali dirumuskan oleh Deng Xiaoping dengan tujuan penyatuan negara Tiongkok secara damai pada tahun 1980 an. Deng Xiaoping pada masanya sebagai kepala negara Tiongkok menyarankan bahwa adanya satu negara dua sistem sebagai salah satu bentuk yang menyatakan bahwa Tiongkok adalah satu, namun wilayah Tiongkok yang berbeda seperti Taiwan, Hong Kong dan Macau dapat mempertahankan sistem ekonomi dan administrasi mereka sendiri, sementara wilayah lain di negara Tiongkok masih menggunakan sosialisme dengan sistem karakteristik Tiongkok. Berdasarkan dengan diterapkannya kebijakan ini, ketiga wilayah tersebut dapat terus memiliki sistem pemerintahan sendiri, urusan hukum, ekonomi dan keuangan, politik dan termasuk hubungan dagang dengan negara-negara asing (Yang, 2014).

Kebijakan administrasi ini muncul diakibatkan adanya dua prinsip atau ideologi yang berbeda. Tiongkok daratan merupakan satu wilayah yang memiliki sistem sosialis, sedangkan Taiwan dan Hong Kong merupakan wilayah yang memiliki sistem kapitalis. Untuk menyatukan kembali beberapa wilayah ini, Tiongkok tidak bisa menginterferensi dengan cara pemaksaan untuk kembali dan menggunakan sistem sosialis seperti beberapa wilayah bagian yang ada di Tiongkok daratan. Dengan kondisi yang berbeda, Tiongkok harus mencari celah untuk menyatukan kembali wilayah-wilayah bagian yang sudah terpisah dengan tidak mengganti sistem yang sudah diterapkan. Namun walaupun dengan dirumuskannya kebijakan administrasi ini bukan berarti kebijakan Tiongkok sebelumnya yaitu *One China Policy* dihapuskan, kebijakan satu Tiongkok ini masih aktif sampai sekarang ini dan di tambah oleh kebijakan *One Country Two System*.

Sebelum berlakunya kebijakan administrasi “Satu Negara, Dua Sistem” hanyalah berupa prinsip dasar yang bertujuan untuk memberikan otonomi tingkat tinggi kepada Taiwan sebagai wilayah administratif khusus (SAR) di Tiongkok jika reunifikasi damai antara kedua belah pihak tercapai dengan baik. Dalam Pasal 31 menjelaskan bahwa: "Negara dapat menetapkan wilayah administratif khusus bila diperlukan. Sistem yang akan dilembagakan di wilayah administratif khusus harus ditentukan oleh undang-undang yang disahkan oleh Kongres Rakyat Nasional dalam kondisi tertentu" (Cheng J. , 2013). Pasal ini merupakan penatap dasar konstitusional untuk berlakunya peraturan dasar hukum. Tepat pada tanggal 4 Desember 1982, Sesi Kelima Kongres Rakyat Nasional Kelima (NPC) telah menyetujui sebuah konstitusi baru di Tiongkok mengenai kebijakan administrasi *One Country Two System*.

Pada awalnya kebijakan ini dicetus dengan tujuan untuk merangkul kembali beberapa wilayah Tiongkok yang terpecah diakibatkan adanya penjajahan dan perperangan. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan prinsip dan ideologi sehingga wilayah yang sudah terpisah dengan Tiongkok sulit untuk kembali, kemudian munculnya kebijakan ini bertujuan untuk menjembatani hubungan yang lebih baik diantara Tiongkok dengan wilayah lainnya terutama wilayah seperti Taiwan, Hong Kong, dan Macau. Akan tetapi dengan penawaran seperti itu tidak dapat membuat Taiwan untuk kembali menjadi bagian dari Tiongkok sedangkan Hong Kong dan Macau tetap kembali kepada Tiongkok (Twu, 2017).

**Gambar 3.1**  
***One Country Two System***



Sumber : <http://sinophiles.slatetakes.com/index.php/2015/05/08/one-country-two-systems/>

## **B. Implikasi Kebijakan *One Country Two System* Bagi Wilayah di Tiongkok.**

Kebijakan *One Country Two System* yang lahir di Tiongkok merupakan suatu bentuk upaya dalam menyatukan beberapa wilayah Tiongkok yang menjadi daerah kolonial negara barat dan adanya perbedaan sistem yang diterapkan di wilayah tersebut. Pada awal dirumuskannya kebijakan ini adalah tertuju kepada dua wilayah yang menjadi target utama Deng Xiaoping pada masa pemerintahannya. Konsep ini akan melahirkan sistem *Special Administrative Region* di Tiongkok, dimana mereka yang kembali kepada Tiongkok berhak mendapatkan otonomi yang lebih tinggi serta kebebasan dalam mengatur sistem ekonomi maupun politik di wilayahnya masing-masing.

### **1. Taiwan**

Taiwan adalah suatu wilayah bagian Tiongkok yang terletak di lepas pantai tenggara Tiongkok, diantara laut Tiongkok selatan dan timur. Masyarakat Taiwan juga berasal dari suku Tionghua, kedatangan imigran Tiongkok ke Taiwan dimulai pada abad ke-17, namun Taiwan pernah diduduki oleh Belanda, Jepang dan Amerika Serikat.

Untuk mewujudnya reunifikasi Tiongkok adalah aspirasi umum oleh semua masyarakat Tiongkok baik dalam negeri maupun luar negeri. Partai komunis Tiongkok dan pemerintah Tiongkok bekerjasama dalam menyelesaikan reunifikasi ini demi tercapainya tujuan Tiongkok sebagai negara kesatuan. Pada tahun 1950 pemerintah Tiongkok mengajukan proposal damai kepada Taiwan, kemudian di tahun 1955 Perdana Menteri Zhou Enlai menyatakan bahwa “orang-orang Tiongkok bersedia, jika ada persyaratan, untuk membebaskan Taiwan dengan cara-cara damai”.

Pada tahun 1960, kepala negara Mao Zhedong mengatakan bahwa jika Taiwan dikembalikan kepada Tiongkok, kecuali urusan luar negeri tetapan harus ditangani oleh otoritas nasional, semua kekuatan militer, politik dan pemerintahan yang ditunjuk dapat didelegasikan oleh Taiwan itu sendiri, inilah mulai terbentuknya konsep “Satu negara, Dua sistem” yang di publikasikan pada era pemerintahan Deng Xiaoping. Pada bulan Januari 1979 Deng Xiapoing sebagai kepala negara Tiongkok mengemukakan konsep *One Country Two Sytem* dan menyatakan bahwa “selama Taiwan kembali ke pangkuan Tiongkok maka pemerintah Tiongkok akan bersedia menghormati

kenyataan dan sistem yang berlaku di Taiwan” (Ministry of Foreign Affairs of the Peoples's Republic of China, 2014)

Pada tanggal 30 September 1981, Ye Jianying sebagai ketua komite tetap Kongres Rakyat Nasional Tiongkok secara resmi mengajukan proposal sembilan poin untuk mewujudkan reunifikasi damai Tiongkok daratan dan Taiwan. Dengan adanya proposal pengajuan tersebut juga menyatakan bahwa jika Taiwan bergabung dengan Tiongkok maka pemerintah Tiongkok tidak akan melakukan intervensi terhadap Taiwan, Tiongkok akan memberikan kebebasan dalam berbagai hal seperti Taiwan diperbolehkan tetap memakai sistem yang sudah ada baik ekonomi maupun sosial politik dan hubungan kerjasama dengan negara-negara lain. Ketentuan mengenai pembentukan wilayah administratif khusus ditambahkan pada konstitusi dari Republik Rakyat Tiongkok berlalu pada sesi Kelima Kongres Rakyat Nasional pada tahun 1982. Pada tanggal 30 Januari 1995, Presiden Tiongkok Jiang Zemin menyampaikan sebuah pidato demi lancarnya proses reunifikasi yang berjalan di Tiongkok (Ministry of Foreign Affairs of the Peoples's Republic of China, 2014).

Namun pada kenyataannya, Taiwan itu sendiri tidak mau bergabung dengan Tiongkok walaupun dengan adanya proposal yang telah diajukan sebagai bahan pertimbangan kepada Taiwan. Li Denghui dan sejumlah kecil masyarakat Taiwan mengkhianati asas “Satu Tiongkok” dan meminta untuk diganti dengan asas “Satu Tiongkok, Satu Taiwan”. Selain dari pada permasalahan diatas, pemerintah Taiwan, yang dikenal secara resmi sebagai Republik China (ROC), dikenal secara luas sebagai satu-satunya pemerintah Tiongkok yang sah sampai Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan Resolusi 2758 pada tahun 1971. Resolusi ini menggantikan ROC dengan saingan komunisnya, negara Tiongkok di PBB. Setelah perampasan kursi PBB telah meninggalkan Taiwan dalam kekosongan hukum global, negara-negara asing dan organisasi internasional telah menerapkan konsep hukum kreatif untuk menyelamatkan situasi (Hsieh, 2009).

Selain itu, dari perspektif hubungan internasional, Selat Taiwan, salah satu zona konflik yang paling mungkin terjadi di wilayah Asia-Pasifik, telah dijuluki sebagai "Semenanjung Balkan di Timur." Taiwan-Tiongkok, atau selat silang, menjadikan situasi semakin parah oleh lokasi geo-strategis utama Taiwan, yang telah menyebabkan kedaulatan di pulau ini tetap menjadi isu paling sensitif dalam hubungan Tiongkok-Amerika Serikat (Hsieh, 2009).

Melihat dari jalannya sejarah bagaimana upaya Tiongkok untuk melakukan reunifikasi dengan Taiwan, bahwasanya integrasi yang dilakukan Tiongkok tidak berhasil sehingga Taiwan tetap bertahan untuk mendirikan negara sendiri dan berdaulat dengan sistem negara demokrasi. Selain itu bertahannya Taiwan dengan sistem tersebut juga didorong oleh dukungan dari Amerika Serikat. Sejarah awal mula bagaimana Taiwan bisa menjadi negara dengan sistem demokrasi yaitu Taiwan terus berada di bawah pemerintahan darurat seperti yang dinyatakan di dalam “Undang-undang Darurat selama Pemberontakan Komunis” yang dalam karakter tradisionalnya yaitu “動員戡亂時期臨時條款” dan pemerintahan satu partai hingga empat dekade dari tahun 1948 ke tahun 1987, saat Presiden Chiang Ching-kuo dan Lee Teng-hui, yaitu merupakan seorang Presiden pertama yang berasal dari keturunan penduduk asli setempat, secara berangsur-angsur meliberalisasikan dan mendemokrasikan sistem pemerintahan.

Pada tahun 2000, Chen Shui-bian dari partai pro-kemerdekaan Partai Progresif Demokrat (DPP) memenangi pemilu presiden dan menjadi Presiden pertama Republik Cina yang bukan dari partai KMT. Dalam Pilpres yang berlangsung pada tahun 2004, setelah Insiden 319 yang terjadi satu hari sebelum hari pemilu. Chen dan wakil presiden Annette Lu tertembak sewaktu berpawai dalam satu kampanye di kota Tainan. Chen dilantik kembali sebagai Presiden Taiwan dengan kemenangan tipis 0,2%. Partai pimpinan Chen, DPP, juga gagal menguasai dewan majelis dengan memenangkan mayoritas kursi, dan kalah atas partai KMT yang menginginkan penyatuan kembali dengan Tiongkok Daratan pada tahun 2005. Akan tetapi, DPP berhasil menguasai Dewan Nasional Republik Cina.

Integrasi yang dilakukan oleh Tiongkok dalam tujuan reunifikasi ini tidak berjalan dengan lancar dan apa yang diupayakan oleh Tiongkok tidak berhasil. Taiwan tidak menerima tawaran dari Tiongkok walaupun dijadikan wilayah administratif khusus. Taiwan pada saat sekraang ini telah berdiri sendiri dan tidak lagi menjadi wilayah bagian dari negara Tiongkok, dimana semua sistem pemerintahan, ekonomi, militer, uang yang berlaku dan luar negeri diatur oleh pemerintahan Taiwan itu sendiri.

## 2. Hong Kong

Hong Kong merupakan salah satu wilayah yang dijadikan *Special Administrative Region* (SAR) oleh Tiongkok, dengan adanya kebebasan yang dimiliki Hong Kong dalam sistem pemerintahan, ekonomi, politik dan lainnya merupakan salah satu implikasi dari

adanya kebijakan *One Country Two System* yang sebelum Hong Kong kembali ketangan Tiongkok sudah diberlakukan oleh Tiongkok. Proses kembalinya Hong Kong kepada Tiongkok tidak jauh dari adanya kesuksesan integrasi yang terjadi diantara ketiga pihak yang bersangkutan, jalannya integrasi menimbulkan dampak terhadap kepercayaan satu sama lain dan bagaimana proses penyatuan kembali Hong Kong sebagai wilayah bagian Tiongkok. Hong Kong juga merupakan salah satu wilayah yang menjaji faktor pendorong lahirnya kebijakan *One Country Two System* di Tiongkok.

Berdasarkan komitmen pemerintah Tiongkok paska Deng Xiaoping untuk melanjutkan reformasi ekonomi dan integrasi lebih lanjut dari Tiongkok ke dalam ekonomi dunia, sangat tidak mungkin pemerintahan Tiongkok akan mengambil kebijakan yang diketahui akan membahayakan ekonomi Hong Kong yang kuat. Pada waktu Hong Kong kembali ke pangkuan Tiongkok di akhir 1970an, pemerintah Tiongkok menegaskan bahwa Tiongkok akan menjalankan konsep kebijakan *One Country Two System* dimana Hong Kong akan berada di bawah kedaulatan Tiongkok, namun Hong Kong akan tetap bisa mempertahankan identitasnya, menjalankan sistem yang berbeda terutama sistem ekonomi yang berorientasi pasar terbuka dan gaya hidup yang berbeda (Sherlock, Hong Kong and the Transfer to China: Issues and Prospects, 1997).

Mungkin perbedaan paling signifikan antara Cina daratan dan Hong Kong adalah bahwa daratan adalah komunis sementara Hong Kong memiliki demokrasi yang terbatas. Keduanya berbagi Presiden Cina sebagai kepala negara mereka. Namun, masing-masing memiliki kepala pemerintahan sendiri: Premier adalah kepala Cina daratan, sedangkan Kepala Eksekutif adalah kepala Daerah Administratif Khusus Hong Kong.

*Chief Executive* (Kepala Eksekutif) bertanggung jawab kepada Pemerintah Pusat Rakyat. Masa jabatan Kepala Eksekutif adalah selama lima tahun, dan setiap orang dapat melayani untuk maksimum dua istilah berturut-turut. Kepala Eksekutif ini merupakan jabatan pemerintahan tertinggi di Hong Kong, yang dibentuk untuk menggantikan jabatan Gubernur Hong Kong saat Hong Kong masih menjadi koloni Inggris. Kepala Eksekutif Hong Kong pertama adalah Tung Chee Hwa yang mulai menjabat di tahun 1997, menggantikan Chris Patten, yang menjabat sebagai gubernur terakhir di Hong Kong.

Hong Kong juga memiliki sistem hukum dan peradilanannya sendiri (termasuk kepolisian khusus), organisasi distrik (tanpa kekuatan politik) dan pegawai negeri, secara luas berdasarkan model

hukum umum Inggris. Namun, untuk masalah kepemilikan tanah dan keluarga, Hong Kong beralih ke model hukum adat Tiongkok. Hal ini muncul diakibatkan kembalinya Hong Kong ke pangkuan Tiongkok dan adanya beberapa hal yang memang harus disepakati oleh Hong Kong dan Tiongkok dalam proses penyatuan kembali wilayah yang sebelumnya terpisah.

### **C. Proses Negosiasi Antara Hong Kong dan Tiongkok Untuk Mencapai Integrasi yang Sama-sama Diinginkan oleh Kedua Belah Pihak.**

Integrasi yang terjadi antara Hong Kong dan Tiongkok merupakan satu bentuk penyelesaian permasalahan berupa perbedaan prinsip ataupun sistem yang diterapkan, sehingga muncul suatu kendala dalam penyatuan kembali kedua komponen ini. Walaupun demikian, Tiongkok berusaha menawarkan berbagai hal sebagai bentuk negosiasi dengan Hong Kong termasuk pemerintahan Inggris yang masih memiliki hak untuk menentukan Hong Kong pasti atau tidak akan kembali ke pangkuan Tiongkok.

Salah satu konsep yang ditawarkan oleh Tiongkok kepada Hong Kong yaitu Tiongkok akan menjalankan kebijakan *One Country Two System* dan SAR sebagai salah satu bentuk praktek dalam pelaksanaannya. Konsep ini merupakan salah satu cara negosiasi yang dilakukan oleh Tiongkok agar Hong Kong menerima tawaran dari Tiongkok untuk bergabung kembali dan berada di bawah kedaulatan Tiongkok.

Berkaitan dengan pasal 31 yang menyediakan dasar konstitusional untuk pembentukan wilayah administratif khusus yang memiliki perbedaan sistem sosial dan kebijakan berbeda dengan wilayah lain di Tiongkok, dikarenakan tujuan reunifikasi damai yang menjadi kepentingan Tiongkok. Setelah penyelidikan dan penelitian mendalam, pemerintah China merumuskan 12 kebijakan dasar mengenai pertanyaan Hong Kong, yang dikenal sebagai "12 Prinsip" pada awal 1983. Isi dari prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh Tiongkok berupa pemerintah Tiongkok meresmikan kedaulatan Hong Kong pada tanggal 1 juli 1997, setelah pelaksanaan kedaulatan Hong Kong akan menjadi wilayah administrasi khusus di Tiongkok, Hong Kong akan berada di bawah wewenang pemerintah Tiongkok dan akan menikmati otonomi tingkat tinggi, seperti sistem pemerintahan akan diurus sendiri oleh penduduk asli Hong Kong.

Sistem sosial dan ekonomi saat ini di Hong Kong akan tetap tidak berubah, dan begitulah gaya hidup. Kebebasan, termasuk pidato,

pers, perakitan, asosiasi, perjalanan, pergerakan, korespondensi, dan kepercayaan religius akan dipastikan di Hong Kong. Kepemilikan pribadi, kepemilikan perusahaan, hak sah warisan dan investasi asing akan dilindungi undang-undang. Hong Kong tetap menjadi pelabuhan bebas, dan pusat kerjasama ekonomi dengan berbagai negara asing. Dengan menjadi wilayah bagian dari Tiongkok, Hong Kong akan lebih leluasa dalam menjalankan beberapa kerjasama baik pemerintah, organisasi, budaya dan lainnya dengan wilayah bagian Tiongkok lainnya. Pemeliharaan ketertiban umum di Hong Kong akan menjadi tanggung jawab pemerintah Hong Kong. Semua kebijakan yang disebutkan dan dijelaskan di atas akan diatur dalam Undang-Undang Dasar Hong Kong oleh NPC Tiongkok dan akan memiliki perubahan setelah 50 dari ditetapkannya Hong Kong sebagai wilayah administrasi khusus (Yang, 2014).

Hong Kong merupakan satu wilayah bagian Tiongkok yang memiliki tingkat negosiasi yang lumayan baik, dikarenakan kemajuan Hong Kong dalam bidang ekonomi mampu menjadi faktor kualitas keberhasilan negosiasi yang dilakukan oleh Hong Kong kepada Tiongkok. Pendekatan utama Hong Kong untuk bernegosiasi dalam ranah kerjasama ekonomi adalah menggunakan metode tawar-menawar distributif dan kontingensi. Di Hong Kong, pihak pembeli berada dalam posisi superior, dan kedua belah pihak dalam kesepakatan bisnis memiliki tanggung jawab untuk mencapai kesepakatan. Mereka mengharapkan komitmen jangka panjang dari mitra bisnis mereka dan akan fokus terutama pada keuntungan jangka panjang. Meskipun gaya negosiasi utama adalah kompetitif, Hong Kong dan Tiongkok tetap menghargai hubungan jangka panjang.

Negosiasi di Hong Kong berlangsung secara damai, jika ada pertikaian diantara kedua belah pihak maka diadakan kompromi yang mana bertujuan untuk menyatukan kembali kedua belah pihak untuk mendapatkan manfaat dari hasil kerjasama yang dilakukan. inilah hal serupa yang terjadi diantara Hong Kong dan Tiongkok dimana antara kedua komponen ini mampu mempertahankan kerjasama jangka panjang walaupun dalam praktek pelaksanaannya terdapat beberapa perbedaan. Negosiator Hong Kong akan mengumpulkan informasi terlebih dahulu sebelum masuk kepada tahap perundingan, dimana ini menandakan bahwa Hong Kong sangat siap untuk menghadapi perundingan dan memiliki jalan tersendiri dalam penyelesaian perbedaan pendapat. Seperti halnya Tiongkok yang ingin Hong Kong kembali ke pangkuannya, Hong Kong terlebih dahulu mendiskusikan rincian dari tawaran Tiongkok, dan membahas mengenai konsesi yang

akan diterima oleh Hong Kong setelah bergabung kembali dengan Tiongkok (Katz, 2008).

Ketika perundingan terjadi antara Hong Kong, Tiongkok dan Inggris mengenai persoalan pengembalian Hong Kong ke pangkuan Tiongkok, hasil dari perundingan yang dilakukan membutuhkan waktu yang sangat lama. Tetapi pelaksanaan perjanjian berlangsung sangat cepat sampai diresmikannya Hong Kong kembali ke pangkuan Tiongkok. Adanya penawaran diantara kedua pihak terutama berdasar dengan 12 kebijakan dasar yang dikemukakan oleh Tiongkok dalam menjawab pertanyaan Hong Kong, sebagai bentuk konsesi yang diberikan oleh Tiongkok kepada Hong Kong, sehingga ketika Hong Kong bergabung dengan Tiongkok, Hong Kong menjadi salah satu wilayah administratif khusus yang memiliki otonomi yang sangat tinggi.

Pengambilan keputusan Hong Kong dalam perundingan ini juga disertai dengan dorongan pihak lain, dimana Hong Kong sendiri berani mengambil resiko atas apa yang telah diputuskan. Meskipun perjanjian sementara biasanya disimpan, Hong Kong tidak menganggapnya sebagai perjanjian akhir. Mengenai perjanjian dan kontrak, kontrak akhir yang ditandatangani oleh kedua belah pihak merupakan perjanjian yang mengikat. Hong Kong dipengaruhi oleh dua pandangan yang sangat berbeda tentang peran perjanjian dan kontrak. Di satu sisi, posisi tradisional Tiongkok adalah bahwa perjanjian hanyalah rujukan yang berlaku pada waktu tertentu dan bersifat akhir. Hong Kong memandang kontrak sebagai catatan yang mendokumentasikan maksud dari hubungan kerja pada saat mereka berunding dan menandatangani, bukan sebagai perjanjian akhir yang dapat bertahan dalam ujian litigasi. Di sisi lain, ada pengaruh Inggris, yang menentukan kontrak yang dianggap serius dan diikuti ke dalam perjanjian dan penyuratan. Akibatnya, kontrak akhir biasanya dapat dipercaya, meskipun selalu bijaksana untuk memelihara hubungan Tiongkok dengan mitranya Hong Kong secara berkelanjutan.

Dengan dilakukan integrasi ini, Hong Kong pada akhirnya kembali ke pangkuan Tiongkok dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh kedua pihak serta adanya penyerahan secara resmi oleh pemerintah Inggris kepada pemerintah Tiongkok. berdasarkan teori yang digunakan yaitu rasional integrasi yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Tulus Warsito, M.Si. dimana Hong Kong bergabung dengan Tiongkok merasa rugi, akan tetapi terdapat konsesi bagi Hong Kong atas beberapa hal sehingga Hong Kong menerima negosiasi dari Tiongkok dan kembali ke pangkuan Tiongkok secara damai.

Hasil dari negosiasi tiga pihak diantara HongKong, Tiongkok dan Inggris adalah Deklarasi Bersama Inggris-Tiongkok pada 19 Desember 1984. Deklarasi ini berisi rincian mengenai keistimewaan yang akan dimiliki Hong Kong sebagai SAR setelah kembali ke pangkuan Tiongkok. Isi dari deklarasi ini menyatakan bahwa Hong Kong menyetujui dua belas prinsip yang diajukan Tiongkok terkait dengan statusnya setelah bergabung dengan Tiongkok.

## **BAB IV**

# **KEUNGGULAN DAN FAKTOR-FAKTOR PENENTU HONG KONG SEBAGAI WILAYAH ADMINISTRATIF KHUSUS**

Di dalam bab ini penulis akan membahas mendalam tentang keunggulan Hong Kong dari wilayah Tiongkok lainnya dan faktor-faktor yang menjadikan Hong Kong lebih unggul terutama dalam bidang perekonomian serta faktor Tiongkok menjadikan Hong Kong sebagai wilayah administratif khusus (SAR). Dalam bab ini juga membahas keunggulan Hong Kong dilihat dari sektor ekonomi dan letak geografisnya yang sangat penting dalam pasar perdagangan dunia, serta berlakunya teori pembangunan ekonomi yang berdampak pada perbedaan tingkatan level ekonomi antara Hong Kong dan beberapa wilayah bagian di Tiongkok.

Bab ini lebih difokuskan dalam membahas bagaimana sistem ekonomi yang berlaku di Hong Kong. Dengan adanya kemajuan dari sektor ekonomi Hong Kong, Tiongkok berupaya menetapkan status Hong Kong sebagai SAR (*Special Administrative Regions*) dan menjalankan kepentingannya untuk pertumbuhan perekonomian Tiongkok secara keseluruhan. Selain itu juga dijelaskan status SAR (*Special Administrative Regions*) yang merupakan langkah rasional yang diambil oleh Tiongkok sebagai upaya untuk menyatukan kembali Hong Kong sebagai salah satu wilayah bagiannya, meski dalam perkembangan terbaru, terjadi revolusi payung sebagai bentuk protes masyarakat Hong Kong terhadap batasan-batasan yang akan diberlakukan oleh pemerintah Tiongkok.

### **A. Keunggulan Sektor-Sektor Ekonomi Hong Kong**

Hong Kong memiliki kemajuan dalam bidang ekonomi, kemajuan tersebut tentunya didukung oleh adanya peningkatan kualitas dan kuantitas dari beberapa sektor yang menjadi faktor pendorong laju pertumbuhan ekonomi Hong Kong itu sendiri. Keunggulan sektor-sektor ekonomi Hong Kong adalah salah satu hal yang mendasari adanya kepentingan Tiongkok dalam meningkatkan pembangunan ekonomi negaranya. Sektor-sektor ekonomi Hong Kong berkembang pesat dimulai dari era datangnya Inggris yang menjadikan Hong Kong sebagai daerah kolonialnya dan menerapkan sistem ekonomi kapitalis di Hong Kong. Pada dasarnya terdapat indikator ekonomi utama yang berpengaruh terhadap kemajuan

ekonomi Hong Kong, dapat dilihat dalam beberapa tahun belakangan ini dalam tabel berikut:

**Tabel 4.1**  
**Indikator Ekonomi Utama**

|  | 2015   | 2016   | 2017   | Lates             |
|--|--------|--------|--------|-------------------|
| Populasi, Pertengahan Tahun (Miliar)     | 7.29   | 7.34   | 7.39   |                   |
| PDB (US\$Biliar)                         | 307.5  | 319.3  | 341.4  |                   |
| PDB Perkapita (US\$)                     | 42,200 | 43,500 | 46,200 |                   |
| Pertumbuhan PDB nyata (%)                | +2.4   | +2.1   | +3.8   |                   |
| Inflasi (% perubahan dalam CPI komposit) | +3.0   | +2.4   | +1.5   | +1.7 <sup>a</sup> |
| Tingkat pengangguran (%)                 | 3.3    | 3.4    |        | 2.9 <sup>b</sup>  |
| Pertumbuhan penjualan ritel (%)          | -3.0   | -8.1   | +2.2   |                   |
| Pertumbuhan kedatangan pengunjung (%)    | -2.5   | -4.5   | +3.2   |                   |

\*<sup>a</sup> perubahan pertahun di Januari 2018;<sup>b</sup> Disesuaikan secara musim November 2017-Januari 2018.

Sumber: <http://hong-kong-economy-research.hktdc.com>

**Tabel 4.2**  
**Kinerja perdagangan barang dagangan (Pertumbuhan %)**

| Dalam Nominal      | 2016       |      | 2017       |      | Januari 2018 |       |
|--------------------|------------|------|------------|------|--------------|-------|
|                    | US\$biliar | %    | US\$biliar | %    | US\$biliar   | %     |
| Total ekspor       | 460.0      | -0.5 | 496.9      | +8.0 | 44.9         | +18.1 |
| Ekspor domestic    | 5.5        | -8.5 | 5.6        | +1.4 | 0.4          | +5.2  |
| Re-ekspor          | 454.5      | -0.4 | 491.3      | +8.1 | 44.4         | +18.3 |
| Impor              | 513.9      | -0.9 | 558.6      | +8.7 | 49.0         | +23.8 |
| Total perdagangan  | 973.9      | -0.7 | 1,055.5    | +8.4 | 93.8         | +21.0 |
| Neraca perdagangan | -53.9      | N/A  | -61.7      | N/A  | -4.1         | N/A   |

Sumber: <http://hong-kong-economy-research.hktdc.com>

**Tabel 4.3**  
**Kinerja perdagangan layanan**

| Dalam Nominal      | 2015       |      | 2016       |      | 2017       |      |
|--------------------|------------|------|------------|------|------------|------|
|                    | US\$biliar | %    | US\$biliar | %    | US\$biliar | %    |
| Ekspor             | 103.7      | -2.4 | 98.1       | -5.5 | 103.9      | +5.9 |
| Impor              | 73.6       | +0.1 | 74.1       | +7.0 | 77.2       | +4.2 |
| Total perdagangan  | 177.3      | -1.4 | 172.2      | -2.9 | 181.1      | _5.2 |
| Necara perdagangan | 30.1       | N/A  | 24.        | N/A  | 26.7       | N/A  |

Sumber: <http://hong-kong-economy-research.hktdc.com>

Tiga tabel diatas menjelaskan tentang informasi ekonomi dan perdagangan di Hong Kong. Adanya beberapa komponen yang terdapat didalam tabel seperti ekspor, impor, dan lainnya menunjukkan bahwa Hong Kong memiliki peningkatan setiap tahunnya, peningkatan tersebut berasal dari berkembangnya sektor-sektor ekonomi yang ada di Hong Kong. Perekonomian Hong Kong meningkat 3,8% tahun ke tahun secara nyata pada tahun 2017, setelah tumbuh 2,1% pada tahun 2016. Pemerintah memperkirakan ekonomi Hong Kong akan tumbuh 3-4% pada tahun 2018. Nilai penjualan ritel, secara nominal, meningkat 2,2% tahun ke tahun pada tahun 2017, setelah penurunan 8,1% untuk tahun 2016. Kondisi pasar tenaga kerja tetap ketat. Tingkat pengangguran yang disesuaikan secara musiman adalah 2,9% untuk periode tiga bulan yang berakhir Januari 2018, dibandingkan dengan 3,4% untuk tahun 2016. Harga konsumen tumbuh 1,7% tahun ke tahun pada Januari 2018, setelah naik 1,5% untuk 2017. Pemerintah memperkirakan harga konsumen Hong Kong akan meningkat 2,2% pada 2018. Ekspor barang dagangan Hong Kong meningkat 18,1% tahun ke tahun pada Januari 2018, setelah pertumbuhan yang signifikan sebesar 8% pada tahun 2017 (Hong Kong Trade Development Council, 2018).

### **1. Letak Hong Kong Sebagai Pusat Transit Internasional**

Seperti yang kita ketahui bahwasanya sejarah awal mula nama Hong Kong sangat berkaitan dengan Hong Kong sebagai pusat transit internasional. Nama “Hong Kong” (HK) dari bahasa Kantonis atau nama Hakka yang artinya “fragrant harbour” (pelabuhan yang harum) dalam bahasa Inggris. Sebelum 1842, nama itu asalnya merujuk pada teluk kecil –kini Aberdeen Harbour/Little Hong Kong antara pulau Ap Lei Chau dan sisi selatan Pulau Hong Kong (Dompot Dhuafa

Hongkong, 2017). Hong Kong merupakan salah satu wilayah bagian Tiongkok yang sangat banyak dikunjungi oleh warga negara asing dari berbagai penjuru dunia yang setiap tahun jumlahnya memiliki peningkatan yang cukup pesat, ditandai dengan banyaknya kerjasama yang dilakukan oleh Hong Kong dengan negara-negara lain.

Pemerintah Inggris mulai berkuasa dan menjajah Hong Kong pada tahun 1841, ketika Perang Opium pertama pecah antara Inggris dan Tiongkok (1839-1843). Seiring waktu, Inggris membentuk ekonomi pasar bebas di koloni barunya tersebut dan mengubahnya menjadi pusat perdagangan di Asia. Hong Kong masih mempertahankan karakteristik ini sejak diserahkan ke Tiongkok pada tahun 1997, sebagaimana ditetapkan dalam Deklarasi Bersama Tiongkok-Inggris 1984 tentang pengalihan kedaulatan Hong Kong ke Tiongkok. Sampai saat sekarang ini Hong Kong tetap menjadi salah satu pusat transit internasional sehingga Hong Kong bukan hanya penting bagi Tiongkok akan tetapi juga bagi negara-negara lain di dunia.

Dengan menjadi salah satu wilayah yang termasuk dalam jalur perdagangan internasional, Hong Kong menjadi wilayah yang sangat banyak dikunjungi. Jumlah warga negara asing yang mengunjungi Hong Kong dibulan maret 2018 adalah sekitar 5.333.562 jiwa, dengan jumlah tertinggi sampai dengan 6.009.577 jiwa pada bulan Agustus 2014 lalu, sedangkan jumlah terendah adalah 427.254 jiwa pada bulan Mei 2003. Jumlah rata-rata kedatangan warga negara asing di Hong Kong adalah 2301158.50 jiwa dari tahun 1992 hingga 2018 (Tranding Economics, 2018).

Berkembangnya Hong Kong sebagai pusat transit internasional didukung oleh majunya beberapa wilayah bagian Tiongkok timur yang juga memiliki peningkatan sangat baik dalam hal perdagangan dunia contohnya seperti Shanghai, Guangzhou, Xiamen dan wilayah bagian lainnya, wilayah-wilayah bagian ini juga merupakan wilayah yang banyak dikunjungi oleh warga negara asing.

**Gambar 4.1**  
**Kondisi Geografis Hong Kong sebagai wilayah bagian Tiongkok**



Sumber

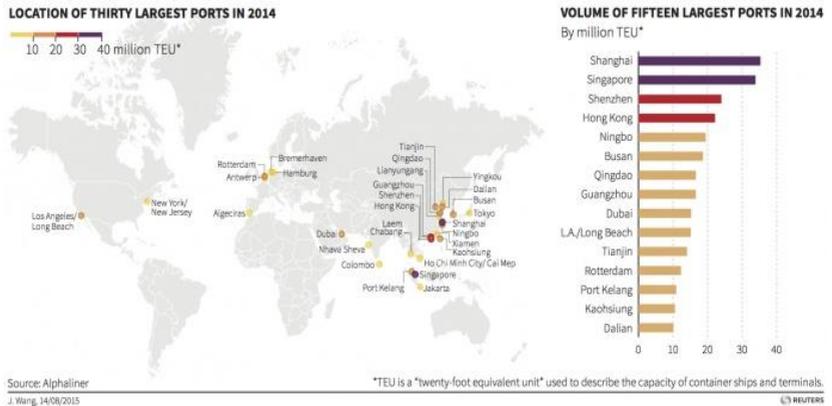
:[http://www.5.csudh.edu/global\\_options/375studentssp96/hongkong/EconSys.html](http://www.5.csudh.edu/global_options/375studentssp96/hongkong/EconSys.html)

Gambar peta diatas menunjukkan Hong Kong merupakan salah satu wilayah yang memiliki banyak pulau, dimana Hong Kong menggunakan kondisi geografisnya dengan sebaik-baiknya, seperti menggunakan perairannya menjadi jalur transit dan perdagangan internasional. Hong Kong menjadi pusat transit internasional dengan kemajuan jasa transportasi dan fasilitas yang disediakan oleh Hong Kong sebagai sarana pendukung yang sangat membantu jalannya perdagangan antara Hong Kong dengan negara-negara lain, dan menjadi hal utama yang menunjang berlansungnya praktek pasar bebas yang dijalankan oleh Hong Kong.

## Gambar 4.2 Posisi pelabuhan Hong Kong di dunia.

### Largest shipping container ports in the world

A majority of ports with the largest shipment volumes processed reside in the Asia Pacific.



Sumber : <https://blogs.thomsonreuters.com/answeron/shipping-container-ports-graphic-day/>

Pelabuhan Hong Kong merupakan salah satu pelabuhan utama di dunia, dimana pelabuhan ini menempati urutan ke empat dari kemampuan menangani kargo setelah pelabuhan Shanghai, Singapura dan Shenchen. Pada gambar diatas dapat dilihat bahwa 3 dari wilayah bagian Tiongkok menduduki peringkat lima teratas. Pelabuhan Hong Kong memiliki kemampuan untuk menangani kargo sebanyak 20 juta TEUs, pelabuhan Hong Kong juga memiliki galangan kapal yang mampu untuk menangani kapal dengan kapasitas sampai 46.000 ton, Hong Kong memiliki beberapa pelabuhan yang mana setiap pelabuhan berfungsi dengan baik dalam praktek akses transportasi perairannya, termasuk memiliki fasilitas pendukung lainnya yang bertaraf nasional di pelabuhannya (Hong Kong Marine Department, 2009).

Hong Kong menjadi pusat transit internasional bukan hanya dikarenakan dari banyaknya masyarakat negara lain yang datang untuk melakukan perdagangan akan tetapi terdapat faktor pendorong seperti kemajuan fasilitas transportasi yang dimiliki Hong Kong itu sendiri. Hong Kong adalah wilayah bagian Tiongkok yang memiliki pusat layanan penerbangan dimana lebih dari 100 maskapai yang beroperasi menghubungkan ke negara-negara diseluruh dunia. Pintu masuk Hong Kong melalui bandara internasional Hong Kong terbuka 24 jam, seperti bandara internasional lainnya, dimana bandara ini konsisten menjadi bandara terbaik di dunia (Badan Pariwisata Hong

Kong, 2018). Bandara internasional Hong Kong merupakan bandara nomor empat tersibuk di dunia, selain itu bandara Hong Kong menjadi salah satu bandara terbaik dari 10 besar peringkat bandara terbaik yang dipublikasikan oleh Skytrax. Skytrax merupakan organisasi pemeringkatan transportasi udara internasional yang bergerak dalam pemantauan lalu lintas udara di dunia (Skytrax, 2018).

**Tabel 4.4**  
**Daftar lengkap 10 bandara terbaik di dunia tahun 2016 menurut Skytrax**

| No. | Nama Bandara                        | Negara        |
|-----|-------------------------------------|---------------|
| 1   | Bandara Internasional Changi        | Singapura     |
| 2   | Bandara Internasional Incheon       | Korea Selatan |
| 3   | Bandara Munich                      | Jerman        |
| 4   | Bandara Internasional Tokyo Haneda  | Jepang        |
| 5   | Bandara Internasional Hong Kong     | Tiongkok      |
| 6   | Bandara Internasional Central Japan | Jepang        |
| 7   | Bandara Zurich                      | Swiss         |
| 8   | Bandara Heathrow London             | Inggris       |
| 9   | Bandara Frankfurt                   | Jerman        |
| 10  | Bandara Internasional Hamad         | Qatar         |

Sumber : <http://www.airlinequality.com/review-pages/top-10-airports/>

Bukti pentingnya Hong Kong sebagai pusat transit internasional ditandai oleh beberapa pencapaian seperti penghargaan internasional yang diberikan kepada Hong Kong berdasarkan hasil dari pengembangan berbagai sektor. Hong Kong pada saat ini bukan hanya sebagai pusat transit internasional, namun banyak pendatang yang berasal dari berbagai negara datang untuk mencari pekerjaan dan membuka usaha serta menanam saham di Hong Kong khususnya pendatang yang berasal dari Tiongkok itu sendiri. Hong Kong menerapkan kebijakan bebas visa untuk beberapa negara, dengan perbedaan tingkatan lamanya kebebasan tanpa visa diberlakukan terhadap warga negara asing berdasarkan negara asalnya, dimana Hong Kong memberikan kebebasan visa selama 180, 90, 30, 14 dan 7 hari (Hong Kong Immigration Department, 2012).

## **2. Sektor-Sektor Unggulan yang Dimiliki Hong Kong**

Hong Kong memiliki keunggulan ekonomi yang tidak dimiliki oleh wilayah Tiongkok yang lain, hal ini dibuktikan dengan

sektor-sektor ekonomi Hong Kong yang sangat maju dibanding dengan wilayah Tiongkok yang lain sebagai dampak penerapan sistem ekonomi kapitalis sejak era kolonial. Adapun sektor-sektor unggulan Hong Kong tersebut bersama karakteristiknya dapat dilihat ditabel dibawah ini:

**Tabel 4.5**  
**Ekonomi Hong Kong**

|  |   |
|--|---|
| Prinsip                                      | Kebijakan ekonomi pasar bebas   |
| Karakteristik Utama Sistem Ekonomi Hong Kong | Perdagangan bebas<br>Pajak rendah<br>Campur tangan pemerintah minimum<br>Berorientasi layanan<br>Hubungan kuat dengan Tiongkok Daratan dan kawasan Asia Pasifik   |
| Sektor Industri Utama                        | <p>Layanan keuangan:<br/>Perbankan<br/>Asuransi<br/>Pialang Saham<br/>Manajemen aset layanan keuangan lainnya</p> <p>Perdagangan dan Logistik:<br/>Angkutan barang<br/>Jasa pengiriman barang<br/>Penyimpanan<br/>Pos<br/>Jasa kurir</p> <p>Pariwisata - <i>Inbound Tourism</i> dan <i>Outbound Tourism</i>:<br/>Pariwisata <i>Inbound</i> meliputi:<br/>Perdagangan eceran<br/>Hotel dan Rumah Kost<br/>Restoran<br/>Layanan Pribadi Lainnya<br/>Agen Perjalanan dan Agen Tiket Penerbangan<br/>Layanan Transportasi Penumpang</p> <p>Pariwisata <i>outbound</i> meliputi:<br/>Agen Perjalanan dan Agen Tiket Penerbangan<br/>Layanan Transportasi Penumpang Lintas Batas yang diberikan kepada Warga Hong Kong yang</p> |

|  |  |
|--|--|
|  | bepergian ke luar negeri<br><br>Produser dan Layanan Profesional:<br>Hukum<br>Akuntansi<br>Auditing<br>Layanan terkait Teknologi Informasi<br>Iklan dan layanan terkait teknik dan layanan teknis terkait jasa desain dan survei arsitektur. |
|--|--|

Sumber : <http://www.hketotoronto.gov.hk/about-hong-kong/hong-kong-economy/index.php>

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sektor-sektor ekonomi utama yang bergerak di Hong Kong lebih berat ke sektor berbasis jasa, hal ini dikarenakan Hong Kong tidak memiliki lahan yang luas seperti wilayah Tiongkok yang lain sehingga tidak memungkinkan bagi Hong Kong untuk memajukan sektor-sektor industri yang membutuhkan banyak lahan seperti pertanian, manufaktur, tambang. Untuk menutupi kekurangan yang dimiliki Hong Kong, diterapkan sistem pasar bebas dan pajak rendah untuk memudahkan masuk dan berputarnya uang dari negara lain di Hong Kong. Kelebihan Hong Kong yang lain berupa hubungan yang kuat dengan kawasan Asia Pasifik menjadikan Hong Kong sebagai wilayah yang diminati para pedagang dan investor asing untuk memasarkan produknya atau melakukan investasi di Hong Kong.

Pemerintah Hong Kong telah secara aktif mengejar pembangunan ekonomi untuk menjaga keunggulan kompetitif wilayahnya. Terdapat empat kunci perindustrian di Hong Kong yang menjadi pendorong kemajuan sektor-sektor ekonomi Hong Kong itu sendiri yaitu: jasa keuangan, pariwisata, perdagangan dan logistik, serta layanan profesional dan produser, telah menjadi kekuatan penggerak pertumbuhan ekonomi Hong Kong. Dengan demikian empat kunci industri ini juga memberikan dorongan untuk pertumbuhan sektor-sektor lain dan menciptakan lapangan kerja. Selain itu, industri-industri yang baru muncul seperti industri budaya dan kreatif, layanan medis, layanan pendidikan, inovasi dan teknologi, layanan pengujian dan sertifikasi, dan industri lingkungan, juga telah diidentifikasi sebagai nikmat dari keuntungan untuk pengembangan lebih lanjut .

Industri budaya dan kreatif (CCI) adalah salah satu sektor paling dinamis di Hong Kong, berkontribusi terhadap pertumbuhan

ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. CCI terdiri dariseperangkat kegiatan berbasis pengetahuan yang menyebarkan kreativitas dan modalintelektual sebagai input utama dan memberikan barang dan jasa dengan konten budaya, artistik dan kreatif (Hong Kong Census and Statistics Department, 2017).

Hong Kong adalah salah satu wilayah di Asia yang memiliki nilai tukar uang yang lumayan tinggi dan biaya hidup serta akomodasi di Hong Kong sangatlah tinggi berbanding terbalik dengan wilayah-wilayah di Tiongkok daratan. Namun walaupun tingginya taraf hidup di Hong Kong, sektor-sektor di Hong Kong tetap dapat berkembang dengan pesat, halini ditandai dengan banyaknya pendatang dari negara-negara asing yang berkunjung untuk membeli barang serta berinvestasi di Hong Kong. Sektor-sektor ekonomi Hong Kong berkembang dengan pesat sehingga menjadikan Hong Kong sebagai salah satu wilayah penguat pembangunan ekonomi Tiongkok dan membantu kemajuan dari wilayah-wilayah bagian Tiongkok lainnya.

Kemajuan sektor-sektor ekonomi Hong Kong mampu menjadi Hong Kong sebagai salah satu ekportir terbesar didunia, ini ditandai dengan banyaknya barang-barang yang ditemui di beberapa negara dengan label *made in Hong Kong*. Hong Kong sangat maju dalam industri pariwisatanya, dimana setiap tahunnya sangat banyak sekali pendatang dari warga negara asing yang berkunjung untuk berwisata dan berlibur di Hong Kong, industri pariwisata ini sangat didukung oleh pemerintah Hong Kong dikarenakan menjadi salah satu pemasukan terbesarnya.

Integrasi ekonomi Hong Kong dengan Tiongkok daratan terus menjadi hal yang paling nyata di sektor perbankan dan keuangan. Inisiatif seperti *Hong Kong-Shanghai Stock Connect*, *Mutual Recognition of Funds*, dan *Hong Kong Shanghai Gold Connect* adalah semua langkah penting untuk membuka pasar modal Tiongkok daratan dan telah memperkuat peran utama Hong Kong sebagai pasar RMB lepas pantai Tiongkok. Skema sambungan tambahan dari obligasi ke komoditas dan produk investasi lainnya juga sedang dalam eksplorasi oleh otoritas Hong Kong. Sektor perbankan dan keuangan merupakan sektor yang sangat penting dalam hubungan kerjasama Hong Kong dan Tiongkok daratan, sehingga sektor-sektor keunggulan Hong Kong sangat berpengaruh terhadap ekonomi Tiongkok.

**Tabel 4.6**  
**Pencapaian Hong Kong di tingkat Internasional ( Bank Dunia )**

| Kategori  | Peringkat Dunia | Keterangan  |
|---|-----------------|---|
| Pasar saham   | 6               |   |
| PDB perkapita                                       | 17              | HK\$ 153,372  |
| Cadangan devisa                                     | 4               | US\$ 87 Biliar  |
| Perdagangan luar negeri                             | 8               | Barang dagangan perdagangan mencapai HK\$2,820 Biliar pada tahun 1995 |
| Bandara (berdasarkan nomor penumpang internasional) | 4               |   |
| Lalulintas Containeer Port (melalui penempatan)     | 1               |   |
| Perbankan (volume eksternal transaksi perbankan)    | 5               |   |
| Pasar voluta asing (omset)                          | 5               |   |
| Daya saing ekonomi                                  | 3               | Survei oleh Forum Ekonomi Dunia                                       |

Sumber : (Jonathan D. Pollack, 1998)

Tabel diatas menunjukkan bahwa Hong Kong merupakan salah satu wilayah yang sangat penting di dunia, bukan hanya dalam bidang perekonomian namun juga dalam bidang-bidang yang lain. Hong Kong telah mendapatkan berbagai penghargaan internasional dalam berbagai sektor ataupun bidang, dalam tabel diatas terdapat beberapa penghargaan ekonomi yang diraih oleh Hong Kong berdasarkan hasil dari penilaian Bank Dunia. Penghargaan tersebut menunjukkan eksistensi yang tinggi Hong Kong di dunia yang berperan aktif dalam kerjasama internasional dan pasar bebas dunia. Selain itu, Hong Kong juga aktif dalam berbagai organisasi dan forum internasional dengan tujuan mencapai level ekonomi yang lebih tinggi lagi dan menjadi salah satu pusat perekonomian di dunia terutama di Asia.

## **B. Faktor-Faktor Penentu Hong Kong Dijadikan Sebagai *Special Administrative Region***

Kondisi Asia Timur tidak habis dikupas, terutama jika menyangkut dengan Hong Kong dan Tiongkok. *Special Administrative Region* (SAR) di Tiongkok merupakan konsep yang diterapkan untuk mempertahankan Hong Kong setelah masa kolonialnya berakhir dan kembali ke pangkuan Tiongkok. Terdapat beberapa faktor yang menjadi faktor penentu dijadikannya Hong Kong sebagai SAR diluar latar belakang Hong Kong yang sebelumnya tergabung dengan Tiongkok dan masih satu bangsa dengan Tiongkok. Faktor-faktor itu meliputi sistem ekonomi Hong Kong, Kepentingan Tiongkok terhadap Hong Kong, *Special Administrative Region* sebagai langkah rasional yang diambil Tiongkok dan tentunya adanya revolusi payung yang menjadi hambatan jalannya konsep *Special Administrative Region* (SAR).

### **1. Sistem Ekonomi yang Dianut Hong Kong**

Berdasarkan sejarah Hong Kong, bahwa setelah Hong Kong menjadi wilayah kolonial dari Inggris membuat suatu sistem ekonomi baru yang diterapkan di Hong Kong. Sistem yang diterapkan berbeda dengan era dimana Hong Kong masih bergabung dengan Tiongkok.

Hong Kong dalam perekonomiannya lebih mengandalkan salah satu sektor, yaitu jasa. Layanan jasa di Hong Kong terkena pajak rendah, seperti pajak pelabuhan yang hampir bebas dan pasar keuangan internasional yang sangat baik. Hong Kong memiliki mata uang sendiri yang bernama dolar Hong Kong, mata uang ini diterbitkan secara legal oleh tiga bank komersial internasional utama dan dipatok terhadap dolar Amerika Serikat. Suku bunga ditentukan oleh masing-masing bank di Hong Kong untuk memastikan sepenuhnya dipergunakan oleh pasar. Selain itu dolar Hong Kong juga dapat digunakan secara bebas di Macau yang merupakan salah satu bagian wilayah Tiongkok yang juga diresmikan sebagai wilayah administrasi khusus di Tiongkok. Hong Kong tidak memiliki sistem bank sentral resmi, adapun yang bertugas mengatur keuangan adalah otoritas bernama *Hong Kong Monetary Authority* (Trading Economics, 2018).

Perdagangan uang secara elektronik adalah evolusi yang mempengaruhi pasar keuangan Hong Kong, sehingga uang digital semakin marak digunakan. Salah satu uang digital yang digunakan di Hong Kong dapat diakses dalam gadget setiap individu bernama *Alipay*. *Alipay* dalam bahasa Mandarin yaitu “支付宝” pinyin yaitu

“Zhi fu bao”, merupakan salah satu kemajuan dalam digital keuangan yang banyak digunakan di Hong Kong dan wilayah Tiongkok lainnya (Alipay, 2018). Selain itu, wechat juga memiliki sistem pembayaran yang sedikit sama dengan *Alipay* yang mana juga berlaku di Hong Kong walaupun tidak terlalu banyak jika dibandingkan dengan *Alipay*. Sedangkan di Tiongkok untuk pemakaian pembayaran menggunakan wechat lebih banyak dibandingkan dengan *Alipay*, wechat masih dipergunakan dalam lingkup kecil karena hanya dipakai di Tiongkok sedangkan *Alipay* sudah merambat ke negara-negara lain seperti Singapura dan lainnya.

Berdasarkan indeks kebebasan ekonomi, Hong Kong memiliki tingkat tertinggi kebebasan ekonomi di dunia dimulai sejak awal munculnya indeks tersebut pada tahun 1995. Ekonomi Hong Kong diatur oleh non-intervensi positif dan sangat bergantung pada perdagangan dan keuangan internasional. Pada tahun 2009, pertumbuhan nyata ekonomi di Hong Kong turun sebesar 2,8% sebagai akibat dari gejolak keuangan global, dimana keuangan global amat mempengaruhi perekonomian di Hong Kong. Hong Kong memiliki sistem yang paling efisien dan prosedur aplikasi bebas korupsi, ditandai dengan tarif pajak penghasilan rendah, tarif pajak perusahaan yang rendah, serta keuangan pemerintah yang sehat dan berkelanjutan (Trading Economics, 2018).

Pemerintah Hong Kong secara konsisten menjunjung tinggi kebijakan “mendorong dan mendukung kegiatan bisnis swasta”. Contohnya terlihat pada perusahaan seperti *Cyberport* dan *Hong Kong Disneyland*. Kebijakan seperti ini memiliki dampak positif pada kinerja ekonomi secara keseluruhan dengan menghapus hambatan yang tidak perlu untuk perusahaan-perusahaan swasta di wilayah administratif khusus. Indeks Bursa Saham Hong Kong merupakan salah satu tujuan utama bagi perusahaan-perusahaan internasional dan perusahaan-perusahaan dari daratan Tiongkok, dikarenakan Hong Kong memiliki industri keuangan internasional yang modern, serta dengan besarnya pasar modalnya di Asia dan alat keuangan yang tersedia yang sebanding dengan London dan New York. (Trading Economics, 2018).

PDB Hong Kong telah tumbuh 180 kali lipat antara tahun 1961-1997, selain itu PDB per kapitanya juga naik sebesar 87 kali lipat dalam rentang waktu yang sama. PDB per kapita Hong Kong untuk paritas daya beli adalah keenam tertinggi di dunia 2011 melebihi beberapa negara di dunia seperti Amerika Serikat dan Belanda. Indeks Bursa Saham Hong Kong merupakan bursa terbesar

keenam didunia, dengan kapitalisasi pasar sekitar 3.32 triliun dolar Amerika Serikat. Hong Kong secara konvensional tidak dianggap sebagai pusat pajak, namun Hong Kong menduduki peringkat keempat di Indeks Kerahasiaan Keuangan 2011 dari *Tax Justice Network*. Pertukaran saham Indeks Bursa Efek Hong Kong adalah yang terbesar keenam di dunia, dengan kapitalisasi pasar sekitar 2.97 triliun dolar Amerika Serikat. Pada tahun 2006, nilai penawaran umum perdana (IPO) yang dilakukan Hong Kong adalah kedua tertinggi di dunia setelah London. Pada tahun 2009, Hong Kong mengangkat 22 persen dari modal IPO, menjadi pusat IPO di dunia. Saingan bursa saham Hong Kong dimasa depan adalah Bursa Efek Shanghai. Pada tahun 2006, Hong Kong Exchanges dan Clearing (HKEX) memiliki omset rata-rata harian 33.4 miliar dolar Amerika Serikat, 12 kali lipat dari bursa Shanghai (Trading Economics, 2018).

## 2. **Kepentingan Tiongkok Terhadap Hong Kong Dalam Sektor Ekonomi**

Hong Kong sebagai *Special Administrative Region* memiliki posisi yang sangat penting bagi Tiongkok terutama dalam hal ekonomi. Dari era kembalinya Hong Kong ke pangkuan Tiongkok, Hong Kong menjadi jendela kesuksesan ekonomi Tiongkok. Hong Kong merupakan peninggalan terpenting di daratan Tiongkok, menurut statistik pemerintah Hong Kong, pada tahun 2017, 58% *re-export* berasal dari Tiongkok dan 54% diperuntukan bagi daratan Tiongkok. Menurut statistik Bea Cukai Tiongkok, Hong Kong adalah mitra dagang terbesar ketiga dari daratan Tiongkok setelah Amerika Serikat dan Jepang, terhitung 7% dari total perdagangan pada tahun 2017.

Hong Kong merupakan sumber investasi terbesar di daratan Tiongkok. Pada tahun 2016, di antara semua proyek di Tiongkok daratan, 44,7% adalah merupakan yang dibantu oleh Hong Kong. *Cumulative Capital Inflow* yang berasal dari Hong Kong berjumlah US\$ 913,7 miliar, akuntansi 51,8% dari total nasional. Di sisi lain, Tiongkok juga menjadi investor terkemuka di Hong Kong, yang mana menurut Department Sensus dan Statistik Hong Kong, menjelaskan bahwa stok investasi yang masuk ke Hong Kong dari daratan Tiongkok mencapai US\$ 418 miliar pada nilai pasar 25,7% dari total pada akhir 2016.

Hong Kong juga merupakan pusat pengembangan modal pantai lepas utama untuk perusahaan Tiongkok. Pada Desember 2017, 1.051 perusahaan-perusahaan dari daratan Tiongkok yang terdaftar di

Hong Kong yang terdiri dari *H-share*, *Red-chip* dan perusahaan swasta lain, dengan total kapitalisasi pasar sekitar US\$ 2,9 triliun, atau 66% dari total pasar. Sejak tahun 1993, perusahaan-perusahaan dari Tiongkok daratan telah mengumpulkan lebih dari 700 miliar dolar Amerika Serikat melalui penawaran saham di Hong Kong.

Pada November 2014, *Shanghai-Hong Kong Stock Connect* diluncurkan untuk membangun akses saham bersama pasar antara Hong Kong dan daratan Tiongkok, sebuah terobosan signifikan dalam pembukaan pasar modal Tiongkok. Pada bulan Desember 2016, *Shenzhen-Hong Kong Stock Connect*, dengan prinsip dan desain program serupa, diluncurkan untuk lebih memfasilitasi aliran investasi dua arah dan mengkonsolidasikan pengembangan Hong Kong sebagai pusat bisnis pantai lepas RMB Global. Pada bulan Juli 2017, akses pasar obligasi bersama antara Hong Kong dan Tiongkok daratan (*Bond Connect*) diluncurkan untuk mempromosikan pengembangan pasar obligasi di dua tempat. Dari beberapa kerjasama yang dilakukan antara Hong Kong dan Tiongkok merupakan salah satu bentuk ketergantungan di antara kedua komponen ini sekaligus Hong Kong menjadi salah satu tumpuan pembangunan ekonomi Tiongkok secara keseluruhan (Hong Kong Trade Development Council, 2018).

Daratan Tiongkok telah lama menjadi mitra dagang terbesar Hong Kong, terhitung sekitar setengah dari total perdagangan Hong Kong berdasarkan nilainya. Sumber daya alam Hong Kong terbatas, dan makanan serta bahan mentah harus diimpor. Sebagai akibat dari pelonggaran perjalanan Tiongkok, jumlah wisatawan daratan ke wilayah itu telah melonjak dari 4,5 juta pada tahun 2001 menjadi 47,3 juta pada tahun 2014, melebihi jumlah pengunjung dari semua negara lain yang digabungkan. Pengunjung Daratan ke Hong Kong menurun 3% pada tahun 2015 menjadi sekitar 45,7 juta, mencerminkan penurunan keseluruhan 2,5% pada total pengunjung ke Hong Kong. Hong Kong juga telah memantapkan dirinya sebagai pasar saham utama bagi perusahaan-perusahaan Tiongkok yang ingin mendaftar ke luar negeri.

Pada tahun 2015, perusahaan daratan Tiongkok merupakan sekitar 51% dari perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Hong Kong dan menyumbang sekitar 62,1% dari kapitalisasi pasar bursa. Selama dekade terakhir, ketika industri manufaktur Hong Kong pindah ke daratan, industri layanannya telah berkembang pesat. Pada tahun 2014, Hong Kong dan Tiongkok menandatangani perjanjian baru untuk mencapai liberalisasi dasar perdagangan jasa di Provinsi Guangdong berdasarkan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Lebih Dekat,

yang diadopsi pada tahun 2003 untuk menjalin hubungan yang lebih erat antara Hong Kong dan daratan Tiongkok. Langkah-langkah baru yang mulai berlaku pada Maret 2015, mencakup daftar negatif dan penyediaan perawatan yang paling disukai, dan akan meningkatkan akses ke sektor layanan daratan untuk perusahaan-perusahaan yang berbasis di Hong Kong. Kepentingan Tiongkok terhadap Hong Kong lebih bertujuan untuk membuka pintu pasar global yang mana Hong Kong telah lebih awal memulai jalannya pasar global.

Di bawah ini akan dijelaskan beberapa kerjasama yang dilakukan oleh Tiongkok dan Hong Kong dalam upaya mencapai kemajuan ekonomi level tinggi yang ditunjukkan dengan banyaknya perusahaan Tiongkok yang beroperasi di Hong Kong :

**Tabel 4.7**  
**Perusahaan Tiongkok di Hong Kong**

| <b>Chinese Military and Civilian Defense Corporations</b>              | <b>Representative Companies in Hong Kong</b>       | <b>Companies Listed on the Hong Kong Stock Exchange</b>         |
|--|--|---|
| China North Industries Corp.   | Silver City International (Holdings) Ltd.          |   |
| China Aerospace Corp   | China Overseas Space Development & Investment Ltd. | China Aerospace Ltd.  |
| Ministry of Electronics Industry                                       | CEIEC (Hong Kong) Ltd.                             |   |
| China National Nuclear Corp.   | Yenaut Industrial Ltd.                             |   |
| China National AeroTechnology Import and Export Corp. (CATIC)          | CATIC (Hong Kong) Ltd.                             |   |
| Poly Group Corp. (Belongs to PLA General Staff Department)             | Ringo Trading Ltd.                                 | Continental Mariner Investment Ltd/Poly Investment Holdings Ltd |
| China Carrie Group Corp. (Belongs to PLA General Political Department) | Carrie Ltd.  | Hong Kong Macau International Ltd.                              |

|   |                         |  |
|---|-------------------------|--|
| China Xinxing Group Corp. (Belongs to PLA General Logistics Department) | Xinxing (Hong Kong) Ltd |  |
|---|-------------------------|--|

Sumber : Tai Ming Cheung, *The Rise of the Red Chips: Tomorrow's Corporate Giants*, Kim Eng Securities, Hong Kong, April 1996.

### 3. SAR Sebagai Langkah Rasional Bagi Tiongkok

*Special Administrative Region* (SAR) merupakan salah satu konsep terapan yang bersumber dari perumusan *One Country Two System*. Adanya pembentukan SAR di Tiongkok dan terutama di wilayah Hong Kong merupakan salah satu langkah rasional yang diambil demi bergabungnya kembali Hong Kong kepada pangkuan Tiongkok. Rasionalnya langkah ini dapat dilihat dari bagaimana hubungan antara Hong Kong dan Tiongkok saat itu, dimana masyarakat Hong Kong menolak pemberlakuan sistem sosialis komunis di Hong Kong apabila Hong Kong bergabung dengan Tiongkok.

Kembalinya Hong Kong kepada Tiongkok adalah salah satu bukti dimana terdapat keberhasilan dari integrasi yang dilakukan oleh Tiongkok serta penerapan wilayah administratif khusus yang berlaku di Hong Kong dan sistem *One Country Two System* yang berlaku di Tiongkok. Pada saat ini wilayah yang sudah diresmikan menjadi wilayah administratif khusus di Tiongkok ada dua yaitu Hong Kong dan Macau, yang mana kedua wilayah ini terletak di Tiongkok Tenggara dan secara geografis jaraknya sangat berdekatan. Sementara untuk wilayah Tiongkok daratan belum ada yang dijadikan wilayah administratif khusus dikarenakan tidak adanya status sebagai wilayah bekas kolonial oleh karenanya masih memegang teguh sistem sosial komunis dan berada dalam wewenang penuh pemerintahan pusat Tiongkok itu sendiri.

Rasionalnya langkah Tiongkok dalam upaya mengembalikan Hong Kong kepada Tiongkok, dilihat dari adanya perbedaan sistem politik dan ekonomi yang diterapkan di Hong Kong, yang bermula pada era kolonial Inggris yang menjadikan Hong Kong menganut paham kapitalis dan demokrasi, sehingga jika Tiongkok ingin Hong Kong untuk kembali ke pangkuannya, tentunya akan ada perbedaan dalam segi sistem yang dianut. Secara nyata Hong Kong akan menolak untuk kembali kepada Tiongkok karena tidak mau mengikuti sistem sosialis dan komunis yang saat ini diterapkan di Tiongkok, dimana Hong Kong yang sudah lebih maju daripada Tiongkok karena

menganut sistem kapitalis merasa sangat rugi jika saat kembali ke pangkuan Tiongkok harus menaati semua peraturan dan undang-undang yang berlaku di Tiongkok itu sendiri.

Dengan perbedaan tersebut Tiongkok berusaha mencari resolusi demi kembalinya Hong Kong walaupun dengan perbedaan sistem yang dianut, dengan dirumuskannya *One Country Two System* yang merupakan upaya kompromi yang dilakukan Tiongkok untuk menyatukan kembali wilayah-wilayah yang pernah menjadi bagiannya seperti Taiwan, Hong Kong dan Macau. Upaya ini bermula pada tahun 1970an, yang pada penerapannya sistem kebijakan administrasi ini menjadikan Hong Kong dan Macau berstatus sebagai SAR dan memiliki kebebasan otonomi tingkat tinggi dibanding dengan wilayah Tiongkok yang lain.

Dengan adanya konsesi dari Tiongkok kepada Hong Kong dan Macau sebagai SAR, yang berupa kebebasan dalam mengatur sistem pemerintahan, ekonomi, keamanan, Hong Kong dan Macau mampu untuk mengatur wilayahnya sendiri secara lebih efisien, dengan metode yang sudah familiar yang sudah diterapkan sejak era kolonial Inggris dan Portugal. Oleh karenanya kedua wilayah SAR itu tidak akan mengalami masalah yang didapat apabila terjadi integrasi dengan sistem yang dianut oleh Tiongkok karena mereka masih menggunakan sistem di era sebelumnya.

Salah satu bukti Rasionalnya SAR sebagai langkah yang diambil oleh Tiongkok yaitu Pemerintah Hong Kong mempromosikan Daerah Administratif Khusus (SAR) sebagai situs untuk internasionalisasi renminbi Cina (RMB). Penduduk Hong Kong diizinkan untuk membuat rekening tabungan dengan denominasi RMB, Obligasi perusahaan dan pemerintah Cina yang didenominasi RMB telah diterbitkan di Hong Kong, dan penyelesaian perdagangan RMB diperbolehkan. Wilayah ini jauh melebihi kuota konversi RMB yang ditetapkan oleh Beijing untuk penyelesaian perdagangan pada tahun 2010 karena pertumbuhan pendapatan dari ekspor ke daratan. Deposito RMB tumbuh sekitar 9,4% dari total deposit sistem di Hong Kong pada akhir 2015. Pemerintah sedang mengupayakan untuk memperkenalkan penggunaan tambahan RMB di pasar keuangan Hong Kong dan sedang berusaha untuk memperluas kuota RMB.

#### **4. Revolusi payung di Hong Kong**

*Umbrella Revolution* (Revolusi Payung) adalah demonstrasi yang ditunjukkan oleh masyarakat Hong Kong kepada Tiongkok diakibatkan kekhawatiran terhadap kebijakan Tiongkok yang

dianggap nantinya mengurangi kebebasan Hong Kong. Revolusi payung merupakan salah satu permasalahan baru yang mencuat dan menjadi tugas baru pemerintahan Tiongkok untuk menyelesaikannya. Inilah demonstrasi berskala besar pertama terjadi di Tiongkok yang dipelopori mahasiswa setelah Tragedi Tiananmen pada 1989. *Revolusi Payung* merujuk pada gerakan kaum muda pro demokrasi di Hong Kong yang muncul pada 23 September 2014 lalu. Gerakan yang dipelopori oleh kalangan pelajar ini merupakan respon terhadap kebijakan Tiongkok atas mekanisme pemilu Hong Kong 2017 yang akan berlangsung saat itu. Selain dari itu, gerakan ini dimotivasi atas dasar kekhawatiran masyarakat Hong Kong, terutama kaum terpelajar atas kebebasan yang kian merosot di kawasan bekas koloni Inggris ini (Puji, 2014).

### **Gambar 4.3** **Demonstrasi yang terjadi akibat Revolusi Payung**



Sumber : <https://www.theguardian.com/world/2014/sep/30/-sp-hong-kong-umbrella-revolution-pro-democracy-protests>

Demonstrasi ini merupakan tantangan bagi pemimpin Tiongkok yaitu Xi Jin-ping sebagai presiden Tiongkok yang mana bertanggung jawab dalam menjaga Hong Kong agar tetap stabil dan makmur. Respon yang gagal bisa merusak salah satu ekonomi terkaya di dunia ini dan akan mencoreng citra baiknya. Lahirnya kebijakan administrasi One Country Two System merupakan suatu bentuk penyatuan kembali wilayah kolonial kepada Tiongkok, dimana

dengan dirumuskannya kebijakan administrasi ini melahirkan konsep SAR. SAR adalah satu konsep yang menjadikan adanya perbedaan sistem di antara beberapa wilayah bagian Tiongkok. Akan tetapi pada hal ini pemerintah Tiongkok memberikan wewenang yang penuh terhadap Hong Kong dalam pelaksanaan pemilihan kepala eksekutif, akan tetapi pada akhirnya pemerintahan Tiongkok berencana untuk menyeleksi calon yang mendaftar sebagai kepala pemerintahan ataupun kepala eksekutif (Maharani, 2014).

Kebebasan yang kian terbatas sebenarnya hanyalah puncak dari persoalan yang telah lama tertimbun. Revolusi Payung tidak saja mempersoalkan mekanisme pemilihan pimpinan eksekutif yang selama ini dipilih langsung oleh dewan partai komunis Tiongkok, melainkan adanya migrasi penduduk daratan yang masuk ke Hong Kong dengan mengambil lahan pekerjaan penduduk lokal. Gerakan sosial Hong Kong ini telah berlangsung dua bulan lamanya semenjak September 2014. Dampak dari gerakan ini juga memberikan pengaruh politis terhadap keberlangsungan pemerintahan dewan partai Tiongkok di Hong Kong. adanya tuntutan yang menjadi perhatian utama dari revolusi payung ini adalah perubahan sistem politik yang tidak memberikan kebebasan memilih bagi warga Hong Kong.

Kepala Eksekutif Hong Kong, Leung Chung-yin, tampaknya tetap kukuh pada pendiriannya. Ia menolak untuk mundur, satu hal senada yang juga diteriakkan demonstran. Leung dan para penasihatnya, dengan dukungan dari para pemimpin Tiongkok, tidak berencana untuk menggunakan kekuatan untuk membubarkan demonstrasi, tetapi juga tidak akan terlibat dalam negosiasi dengan demonstran untuk saat itu (Puji, 2014).

Revolusi Payung yang identik dengan payung yang dibawa oleh peserta demonstrasi, selain sebagai gerakan sosial, dalam kaitannya dengan perubahan sosial, menghendaki tujuan yang diinginkan para demonstran berupa perubahan mekanisme pemilihan yang lebih demokratis. Walaupun tuntutan ini akan berpengaruh terhadap iklim politis dan ekonomi, setidaknya revolusi payung hingga kini masih menjadi bagian dari suara mayoritas masyarakat Hong Kong untuk mempertahankan otonominya dari pemerintahan Tiongkok. Walaupun demikian, revolusi payung Hong Kong juga pada akhirnya akan menjadi gerakan yang berproses mengikuti hukum perubahan sosial, yang membutuhkan lahirnya gerakan sosial berikutnya.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Penelitian ini telah menunjukkan isu penting dalam ekonomi politik internasional yaitu bagaimana upaya pembangunan ekonomi di Negara Tiongkok dapat dilakukan bersama-sama dengan mengembalikan posisi Hong Kong untuk kembali bergabung dengan Negara Tiongkok sebagai salah satu kepentingan Tiongkok terhadap Hong Kong.

Skripsi ini mengambil tema kajian tradisional, maksudnya pembahasan yang lebih menitikberatkan pada permasalahan liberalisme dan pembangunan ekonomi dalam kurun waktu terakhir. Aktor Hubungan Internasional yang paling berpengaruh pada penelitian ini adalah Negara Tiongkok dan Negara Hongkong serta beberapa Negara di wilayah Tiongkok. Keterkaitan antara ketiga aktor ini melahirkan konseptualisasi baru di tengah keberlanjutan kehidupan kapitalis. Dengan kata lain, *security-community* menjadi suatu hal yang penting kaitannya dalam rasional integrasi dimana politik dan kepentingan dapat tercapai dengan saling menguntungkan dan tidak merugikan salah satu pihak.

Konstelasi Hubungan Internasional telah berubah secara drastis (*pasca cold war*) dunia diwarnai oleh polarisasi yang telah mendorong kawasan negara berkembang dan negara maju mempertegas kembali keberadaannya. Kecenderungan itu bila dihadapkan dengan masalah tata ekonomi dunia, ternyata masih tetap tidak dijumpai keadilan. Masalah yang menyangkut utang luar negeri, pertumbuhan ekonomi, arus modal, seakan-akan tidak berubah sehingga perkembangan di bidang ini cenderung menunjukkan formatnya yang multipolar. Pusat-pusat kekuatan ekonomi baru bermunculan sementara beberapa blok-blok ekonomi semakin marak dengan cara mengkonsolidasikan dirinya

Menurut Prof. Tulus Warsito, Rasional Integrasi adalah satu komponen yang bersedia bergabung dengan komponen yang lain untuk membentuk entitas baru berdasarkan empat hal yang menjadi pertimbangan komponen tersebut. Selain itu rasional integrasi adalah bagaimana suatu entitas politik melakukan hubungan dengan entitas politik lainnya berdasarkan apa yang hendak dituju berdasarkan kepentingan diantara kedua entitas politik tersebut. Adanya komponen-komponen dalam integrasi menyatakan bahwa hubungan antara dua entitas politik memiliki kecenderungan untuk mendapatkan keuntungan yang sama dan tidak rugi.

Hong Kong merupakan wilayah bagian dari negara Tiongkok yang telah dikembalikan oleh Inggris di tahun 1997 setelah kurang lebih 150 tahun menjadi wilayah kolonialnya. Adanya pemindahtanganan kedaulatan dari Inggris ke Tiongkok menciptakan suatu gejolak baru dimana rakyat Hong Kong ingin berdiri sendiri dan menjadi negara berdaulat seutuhnya. Hal ini dapat dilihat dari adanya opini-opini dari beberapa elemen masyarakat Hong Kong sebelum Hong Kong diserahkan ke Tiongkok. Namun Pemerintah Tiongkok memilih untuk melakukan proses integrasi dengan Hong Kong dengan menjadikannya sebagai daerah SAR atau wilayah administrasi khusus.

Proses pembangunan ekonomi menurut Rostow bisa dibedakan dalam 5 tahap diantaranya: masyarakat tradisional, pra-kondisi tinggal landas, tinggal landas, menuju kedewasaan, era konsumsi tinggi. Tahapan-tahapan tersebut memberikan tawaran terperinci pada pengambilan kebijakan di suatu negara mengenai tahapan dan prasyarat dari pencapaian tahapan yang harus dilalui untuk menjadikan sebuah negara menjadi lebih maju. Kejelasan teori yang disampaikan Rostow ini melatarbelakangi banyak negara berkembang menerapkan teori ini dalam pembangunan mereka.

Kemajuan ekonomi Hong Kong dapat dilihat dari tahap yang sudah dilaluinya. Dari lima tahap yang dijelaskan oleh Rostow, bahwa Hong Kong sudah mencapai tahap kelima yaitu era konsumsi tinggi. Inilah yang menjadi perbedaan antara Hong Kong dengan wilayah lain Tiongkok, dimana wilayah lain masih berada di tahap satu sampai empat. Inilah yang menjadi bukti dimana Hong Kong dengan ekonomi kapitalisnya mampu lebih maju daripada wilayah Tiongkok yang lain, dimana hal ini ditunjukkan dengan perilaku masyarakat Hong Kong yang memiliki biaya hidup yang lebih tinggi yang ditunjukkan dengan mahalnya harga properti dan pengeluaran harian di Hong Kong dibanding dengan wilayah Tiongkok yang lain.

Kebijakan administrasi ini muncul diakibatkan adanya dua prinsip atau ideologi yang berbeda. Daratan Tiongkok merupakan satu wilayah yang memiliki sistem sosialis, sedangkan wilayah Taiwan dan Hong Kong merupakan wilayah yang memiliki sistem kapitalis. Untuk menyatukan kembali beberapa wilayah ini, Tiongkok tidak bisa menginterferensi dengan cara pemaksaan untuk kembali dan menggunakan sistem sosialis seperti beberapa wilayah bagian yang ada di daratan Tiongkok. Dengan kondisi yang berbeda, Tiongkok harus mencari celah untuk menyatukan kembali wilayah-wilayah bagian yang sudah terpisah dengan tidak mengganti sistem yang sudah ditetapkan. Namun walaupun dengan dirumuskannya kebijakan

administrasi ini, bukan berarti kebijakan Tiongkok sebelumnya yaitu *One China Policy* dihapuskan, kebijakan satu Tiongkok ini masih aktif sampai sekarang ini dan di tambah oleh kebijakan *One Country Two System*.

Sebelum berlakunya kebijakan administrasi “*One Country Two System*”, prinsip dasarnya bertujuan untuk memberikan otonomi tingkat tinggi kepada Taiwan sebagai wilayah administratif khusus (SAR) di Tiongkok jika reunifikasi damai antara kedua belah pihak tercapai dengan baik.

Integrasi yang terjadi antara Hong Kong dan Tiongkok merupakan satu bentuk penyelesaian permasalahan berupa perbedaan prinsip ataupun sistem yang diterapkan, sehingga muncul suatu kendala dalam penyatuan kembali kedua komponen ini. Walaupun demikian, Tiongkok berusaha menawarkan berbagai hal sebagai bentuk negosiasi dengan Hong Kong termasuk pemerintahan Inggris yang masih memiliki hak untuk menentukan Hong Kong pasti atau tidak akan kembali ke pangkuan Tiongkok.

Pemerintah Hong Kong telah secara aktif mengejar pembangunan ekonomi untuk menjaga keunggulan kompetitif wilayahnya. Terdapat empat kunci perindustrian di Hong Kong yang menjadi pendorong kemajuan sektor-sektor ekonomi Hong Kong itu sendiri yaitu: jasa keuangan, pariwisata, perdagangan dan logistik, serta layanan profesional dan produsen, telah menjadi kekuatan penggerak pertumbuhan ekonomi Hong Kong. Dengan demikian empat kunci industri ini juga memberikan dorongan untuk pertumbuhan sektor-sektor lain dan menciptakan lapangan kerja. Selain itu, industri-industri yang baru muncul seperti industri budaya dan kreatif, layanan medis, layanan pendidikan, inovasi dan teknologi, layanan pengujian dan sertifikasi, dan industri lingkungan, juga telah diidentifikasi sebagai nikmat dari keuntungan untuk pengembangan lebih lanjut .

Penulis menyadari masih banyak keterbatasan atas riset yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini. Keterbatasan ini mencakup sumber-sumber yang diperoleh oleh penulis, seperti buku, jurnal, makalah, berita, dan sebagainya. Diluar pembahasan penulisan skripsi ini masih banyak kupasan mengenai ekonomi politik internasional dari sudut pandang lain yang dapat membantu melengkapi konten informasi penelitian ini.

Penulis mengakui bahwa di luar ekonomi politik internasional masih banyak terdapat *best practice* lain yang muncul di berbagai negara. *Best Practice* lain dimungkinkan memiliki esensi keberhasilan

yang sama dengan ekonomi politik internasional. Dalam skripsi ini penulis tidak menyampaikan komparasi antara ekonomi politik internasional dengan *Best Practice* yang lain. Diharapkan bagi para pembaca untuk memaklumi keterbatasan penulis dalam menyusun skripsi ini.

## RENCANA PENULISAN

### Buku

- Cateora, P. R., & L.Graham, J. (2007). *International Marketing*. Jakarta: Salemba Empat dan MC Graw-Hill.
- Jacques, M. (2011). *When China Rules the World*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Mas'oe'd, M. (1990). *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES.
- Warsito, T. (2017). *Rasionalitas Politik*. Yogyakarta: program S3 ilmu politik, Direktorat PascaSarjana UNiversitas Muhammadiyah Yogyakarta dan CV Komojoyo Press .
- Wicaksono, M. (2015). *Dinasti Qing: Sejarah Para Kaisar Berkuncir*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

### E-Book

- Beeching, J. (1975). *The Chinese Opium Wars*. New York: Harcourt Brace Jovanovich.
- Cheng, J. Y. (1997). *The Other Hong Kong Report 1997*. Hong Kong: Chinese University of Hong Kong.
- Cheng, L. (n.d.). Globalization and Shanghai Model. *A Retrospective and Prospective Analysis* , 69.
- Guang, L. P. (2012). *Governance of Hong Kong: Enlightenment from Declassified Archives in Great Britain*. Hong Kong: Oxford University Press.
- John L. Graham, N. M. (2007). *China Now*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Jonathan D. Pollack, R. H. (1998). *In China Shadow: Regional Perspectives on Chinese Foreign Policy and Military Development*. Washington, D.C.: RAND.
- Mathews , G., Ma, E. K.-W., & Lui, T. L. (2008). *Hong Kong, China - Learning to belong to a nation*. New York: Routledge.

- Michael J. Enright, E. E. (1997). *The Hong Kong Advantage*. Hong Kong: Oxford University Press.
- Philip R. Cateora, J. L. (2007). *Pemasaran Internasional 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rostow, W. W. (1960). *The State of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto*. New York: Cambridge University Press.
- Ruck, A. (2008). *Sejarah Gereja Asia*. Jakarta: PT BPK Gunung Mulia.
- Russell, P. H., & O'Brien, D. M. (2001). *Judicial Independence in the Age of Democracy: Critical Perspectives from around the World*. USA: University of Virginia Press.
- William Travis Hanes, F. S. (2002). *Opium Wars: The Addiction of One Empire and the Corruption of Another*. United State of America: Sourcebooks, Inc.
- Wong, Y.-C. R. (2002). *The Role of Hong Kong in China's Economic Development*. Hongkong: University of Hongkong.

### **E-Journal**

- Chiang, Y. F. (2004). One-China Policy and Taiwan. *Fordham International Law Journal*, 2.
- Fok, S. C. (2006). Political Change in Hong Kong and its Implications for Civic Education. *Journal of Moral Education* , 85-99.
- Hsieh, P. L. (2009). Legal Challenges with Renewed Momentum: The Taiwan Question and the One-China Policy. *Journal of International Peace and Organization*, 59.
- Hung, A. T. (2015). Philosophical Foundation of Hong Kong Tertiary Civic. *Formation of Trans-Cultural Political Vision*, 65.
- Ho, P. (2014, Desember 16). *THE WALL STREET JOURNAL*. Retrieved Oktober 27, 2017, from Hong Kong Pulls Into Second in IPOs: <https://www.wsj.com/articles/hong-kong-pulls-into-second-in-ipos-1418766999>

Katz, L. (2008). The Negotiator's Reference Guide to 50 Countries Around the World. *Negotiating International Business*, 4-7.

## Website

Alipay. (2018). *Alipay Home page*. Dipetik Maret 24, 2018, dari Alipay: <https://www.alipay.com/>

Asian Financial Forum. (2015, Januari 19). *Press Releases*. Retrieved Oktober 27, 2017, from <http://www.info.gov.hk/gia/general/201501/19/P201501190511.htm>

Badan Pariwisata Hong Kong. (2018). *Menggunakan Pesawat*. Dipetik Maret 21, 2018, dari [discoverhongkong.com](http://www.discoverhongkong.com): <http://www.discoverhongkong.com/id/plan-your-trip/traveller-info/transport/getting-here/by-plane.jsp>

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud. (2017). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Dipetik Maret 20, 2018, dari [kbbi.web.id](https://kbbi.web.id): <https://kbbi.web.id/integrasi>

BBC Indonesia. (2017, Juni 30). *Mengapa dan bagaimana Inggris mengembalikan Hong Kong ke Cina?* Retrieved 11 21, 2017, from BBC Indonesia: <http://www.bbc.com/indonesia/dunia-40441719>

Central Intelligence Agency. (n.d.). *The World Factbook-Hong Kong*. Retrieved Desember 06, 2017, from Central Intelligence Agency: <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/hk.html>

Central Intelligence Agency US. (2017, 10 19). *Library*. Retrieved 10 23, 2017, from CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY: <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/hk.html>

Chan, H. (2017, May 10). Retrieved October 20, 2017, from <http://www.hkeconomy.gov.hk/en/home/index.htm>

Cheng, J. (2013, Agustus 26). *One Country, Two System*. Dipetik Maret 15, 2018, dari [oxfordbibliographies.com](http://www.oxfordbibliographies.com): [www.oxfordbibliographies.com](http://www.oxfordbibliographies.com)

- CNN Indonesia. (2014, September 30). *Hong Kong, Kota Setengah Tiongkok*. Dipetik Desember 07, 2017, dari DEMOKRASI HONG KONG: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20140930083124-114-4710/hong-kong-kota-setengah-tionggok/>
- Dompot Dhuafa Hongkong. (2017). *Profil Hong Kong*. Dipetik Maret 21, 2018, dari ddhongkong.org: <http://ddhongkong.org/data-hong-kong/profil-hong-kong/>
- Enactment of the "One Country, Two Systems" Concept*. (1982). Dipetik Maret 13, 2018, dari [www.basiclaw.gov.hk](http://www.basiclaw.gov.hk): [http://www.basiclaw.gov.hk/en/publications/book/15anniversary\\_reunification\\_ch1\\_3.pdf](http://www.basiclaw.gov.hk/en/publications/book/15anniversary_reunification_ch1_3.pdf)
- Guangzhou Daily Luo Hua Lin . (2017, July 10). *Buku Biru Guangzhou: Laporan Perkembangan Ekonomi Guangzhou (2017)*. Dipetik Maret 01, 2018, dari [gzass.gd.cn](http://www.gzass.gd.cn): <http://www.gzass.gd.cn/contents/130/8351.html>
- Heritage Foundation. (2017). *Hong Kong*. Retrieved november 22, 2017, from 2017 index of Economic Freedom: <http://www.heritage.org/index/country/hongkong>
- Hong Kong Census and Statistics Department. (2017, Juni 15). *The Culture and Creative Industries in Hong Kong*. Dipetik Maret 26, 2018, dari Hong Kong Census and Statistics Department: <https://www.censtatd.gov.hk/hkstat/sp80.jsp?productCode=FA100120>
- Hong Kong Government. (2016). *History*. Dipetik Maret 04, 2018, dari [www.yearbook.gov.hk](http://www.yearbook.gov.hk): <https://www.yearbook.gov.hk/2016/en/pdf/E22.pdf>
- Hong Kong Immigration Department. (2012). *Visit Visa / Entry Permit Requirements for the Hong Kong Special Administrative Region*. Dipetik Maret 22, 2018, dari Hong Kong Immigration Department: <https://www.immd.gov.hk/eng/services/visas/visit-transit/visit-visa-entry-permit.html>

- Hong Kong Institute of Chartered Secretaries. (2015, Januari 14). Dipetik Oktober 28, 2017, dari [http://www.fstb.gov.hk/en/docs/sp20150114\\_e.pdf](http://www.fstb.gov.hk/en/docs/sp20150114_e.pdf)
- Hong Kong Marine Department. (2009). *Hong Kong Fact Sheet*. Retrieved Maret 22, 2018, from Hong Kong Marine Department: <https://www.mardep.gov.hk/en/aboutus/hkfactsheet.html>
- Hong Kong Trade Development Council. (2018). *Economic and Trade Information on Hong Kong*. Dipetik Maret 26, 2018, dari Hong Kong Trade Development Council: <http://hong-kong-economy-research.hktdc.com/business-news/article/Market-Environment/Economic-and-Trade-Information-on-Hong-Kong/etihk/en/1/1X000000/1X09OVUL.htm>
- Hong Kong Trade Development Council. (2018, Februari 28). *Economic and Trade Information on Hong Kong*. Retrieved Maret 22, 2018, from [hong-kong-economy-research.hktdc.com](http://hong-kong-economy-research.hktdc.com): <http://hong-kong-economy-research.hktdc.com/business-news/article/Market-Environment/Economic-and-Trade-Information-on-Hong-Kong/etihk/en/1/1X000000/1X09OVUL.htm>
- Hong Kong Trade Development Council. (2018, Februari 28). *Economic and Trade Information on Hong Kong*. Dipetik Maret 26, 2018, dari Hong Kong Trade Development Council: <http://hong-kong-economy-research.hktdc.com/business-news/article/Market-Environment/Economic-and-Trade-Information-on-Hong-Kong/etihk/en/1/1X000000/1X09OVUL.htm>
- Hong Kong's Information Service Department. (2014, September 17). *Permanent Secretary for Financial Services & the Treasury (Financial Services) Au King-chi*. Retrieved Oktober 27, 2017, from HK's financial hub role constantly refined: [http://www.news.gov.hk/en/record/html/2014/09/20140917\\_151023.shtml](http://www.news.gov.hk/en/record/html/2014/09/20140917_151023.shtml)
- Maharani, A. (2014, Oktober 01). *Revolusi payung untuk pemilihan langsung*. Retrieved Maret 21, 2018, from Merdeka.com:

<https://www.merdeka.com/dunia/revolusi-payung-untuk-pemilihan-langsung.html>

Ministry of Foreign Affairs. (2017, November 08). *Peaceful Reunification, One Country Two System*. Retrieved Februari 21, 2018, from gov.cn: [http://www.gov.cn/guoqing/2017-11/08/content\\_5238062.htm](http://www.gov.cn/guoqing/2017-11/08/content_5238062.htm)

Ministry of Foreign Affairs of the Peoples's Republic of China. (2014). *A Policy of "One Country, Two System" on Taiwan*. Dipetik Maret 15, 2018, dari fmprc.gov.cn: [www.fmprc.gov.cn](http://www.fmprc.gov.cn)

Overholt, W. (n.d.). *Hong Kong: The Perils Of Semi-Democracy*. Retrieved Desember 07, 2017, from Harvard Kennedy School: [https://sites.hks.harvard.edu/m-rcbg/research/w.overholt\\_problems.of.democracy\\_hong.kong.perils.of.semi.democracy.pdf](https://sites.hks.harvard.edu/m-rcbg/research/w.overholt_problems.of.democracy_hong.kong.perils.of.semi.democracy.pdf)

Perdue, P. C. (2011). *The First Opium War: The Anglo-Chinese War of 1839-1842*. Dipetik Maret 03, 2018, dari ocw.mit.edu: [https://ocw.mit.edu/ans7870/21f/21f.027/opium\\_wars\\_01/ow1\\_essay01.html](https://ocw.mit.edu/ans7870/21f/21f.027/opium_wars_01/ow1_essay01.html)

Puji, S. T. (2014, Oktober 07). *Revolusi Payung*. Dipetik Maret 20, 2018, dari [Republika.co.id](http://www.republika.co.id): <http://www.republika.co.id/berita/koran/teraju/14/10/07/nd2h0a19-revolusi-payung>

Sherlock, S. (1997, Juni 23 ). *Hong Kong and the Transfer to China: Issues and Prospects*. Dipetik Maret 27, 2018, dari Foreign Affairs, Defence and Trade Group: [https://www.apf.gov.au/About\\_Parliament/Parliamentary\\_Departments/Parliamentary\\_Library/Publications\\_Archive/CIB/CIB9697/97cib33](https://www.apf.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/Publications_Archive/CIB/CIB9697/97cib33)

Skytrax. (2018). *About skytrax*. Retrieved Maret 21, 2018, from [skytrax.com](https://skytraxratings.com/about): <https://skytraxratings.com/about>

South China Morning Post. (2016, Juli 01). *Everything you need to know about Hong Kong's return to Chinese sovereignty*. Dipetik Maret 12, 2018, dari [scmp.com](http://www.scmp.com): <http://www.scmp.com/news/hong-kong/education->

community/article/1983718/everything-you-need-know-about-hong-kongs-return

The Information Services Department. (2016, April). *Hong Kong Fact Sheets*. Dipetik October 20, 2017, dari [www.gov.hk](http://www.gov.hk): [https://www.gov.hk/en/about/abouthk/factsheets/docs/service\\_economy.pdf](https://www.gov.hk/en/about/abouthk/factsheets/docs/service_economy.pdf)

The People`s Government of Guangzhou Municipality. (2010). *Guangzhou International*. Dipetik Maret 01, 2018, dari [gz.gov.cn](http://gz.gov.cn): <http://english.gz.gov.cn/gzgooven/s3616/201508/7550e7ddda96487a9105279874e8097a.shtml>

Trading Economics. (2018). *Hong Kong - Economic Indicators*. Dipetik Maret 23, 2018, dari Trading Economics: <https://tradingeconomics.com/hong-kong/indicators>

Trading Economics. (2018). *Hong Kong Visitor Arrivals*. Retrieved Maret 23, 2018, from Trading Economics: <https://tradingeconomics.com/hong-kong/tourist-arrivals>

Twu, J. (2017, Juni 27). *“One country, two systems” is full of contradictions: just look at the Hong Kong-China border*. Dipetik Maret 13, 2018, dari [qz.com](http://qz.com): <https://qz.com/1012174/the-hong-kong-china-border-shows-all-the-contradictions-of-one-country-two-systems/>

World Development Indicators database. (2017, April 17). *Gross national income per capita 2016, Atlas method and PPP*. Dipetik November 29, 2017, dari World Bank: <http://databank.worldbank.org/data/download/GNIPC.pdf>

Yang, C. (2014, Juni 10). *The Practice of the “One Country, Two Systems” Policy in the Hong Kong Special Administrative Region*. Dipetik Maret 13, 2018, dari [web.archive.org](http://web.archive.org): [https://web.archive.org/web/20141008210149/http://news.xinhuanet.com/english/china/2014-06/10/c\\_133396891.htm](https://web.archive.org/web/20141008210149/http://news.xinhuanet.com/english/china/2014-06/10/c_133396891.htm)

## **Interview**

Warsito, T. (2018, Maret 03). Teori Rasional Integrasi. (M. Iqbal, Interviewer)